



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KAB. CIAMIS



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP Kabupaten Ciamis disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan

kegiatan, serta pencapaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 yang telah disepakati berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024.

Dengan tersusunnya LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur atas realisasi dan capaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan terwujudnya kinerja sasaran strategis, serta tercapainya hasil program dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Selama tahun 2023 telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Ciamis baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kinerja yang belum tercapai serta hal-hal yang masih dirasa kurang, menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik kedepannya.

Ciamis, 31 Maret 2023

Bupati Ciamis,



Herdiat Sunarya



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2023. Dalam hal ini terdapat 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) target indikator kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian kinerja 22 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 10 target;
2. Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 3 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 9 target.

Rincian realisasi capaian kinerja masing-masing indikator pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1**Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------|--|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan | Indeks Pendidikan | 67,34 | 66,66 | 98,99% |
| 2. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | Indeks Kesehatan | 80,50 | 84,55 | 105,03% |
| 3. | Meningkatnya daya beli masyarakat | Indeks Pengeluaran | 69,18 | 69,36 | 100,26% |
| 4. | Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) | 64,07 | 64,00 | 99,89% |
| 5. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks Pembangunan Infrastruktur | 81,940 | 83,82 | 102,29% |
| | | Indeks Keselamatan Lalu Lintas | 96,393 | 96,902 | 100,53% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata | Persentase Rumah Layak Huni | 69,62 | 69,62 | 100% |

| | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|---------|
| 7. | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) | 5,68 | 3,35* | 59,98% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,06 | 5,15* | 84,98% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,86 | 1,22* | 42,66% |
| | | Nilai Tukar Petani (NTP) | 112,60 | 109,61 | 97,34% |
| 8. | Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi | Persentase Peningkatan Investasi | 5,50 | 13,36 | 242,91% |
| 9. | Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PPKS yang mandiri | 100 | 99,72% | 99,72% |
| 10. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,52 | 3,52 | 100% |
| 11. | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kualitas Air (TPB6) | 59,75 | 60,34 | 100,99% |

| | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara | 81 | 86,54 | 106,84% |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 34,61 | 59,45 | 171,77% |
| 12. | Meningkatnya kapasitas terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0,7 | 0,68 | 97,14% |
| 13. | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas | Hasil Evaluasi AKIP (TPB16) | BB (70,55) | B (69,30) | 98,23% |
| | | Opini BPK (TPB9) | WTP | WTP | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik (87,24) | Baik (88,27) | 101,18% |
| 14. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10) | 19,23 | 53,45 | 277,94% |
| Rata-rata | | | | | 115,65% |

**Angka Sangat Sementara, Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2023*

Adapun capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar **Rp1.463.578.968.765,00** atau **91,78%** dari pagu anggaran sebesar **Rp1.594.659.093.196,00**.

Atas keberhasilan tersebut di atas, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Ciamis atas kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| PENDAHULUAN | 1 |
| LATAR BELAKANG..... | 2 |
| MAKSUD DAN TUJUAN..... | 3 |
| GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... | 5 |
| DATA KEPEGAWAIAN | 8 |
| ISU STRATEGIS..... | 10 |
| SISTEMATIKA PENYUSUNAN..... | 16 |
| PERENCANAAN KINERJA..... | 17 |
| PERENCANAAN STRATEGIS..... | 18 |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023..... | 21 |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | 23 |
| SASARAN 1..... | 27 |
| SASARAN 2..... | 31 |
| SASARAN 3..... | 34 |
| SASARAN 4 | 37 |
| SASARAN 5 | 40 |
| SASARAN 6 | 47 |
| SASARAN 7..... | 50 |
| SASARAN 8 | 62 |
| SASARAN 9 | 65 |
| SASARAN 10..... | 69 |
| SASARAN 11 | 73 |
| SASARAN 12..... | 85 |



| | |
|------------------------------|------------|
| SASARAN 13..... | 88 |
| SASARAN 14..... | 97 |
| AKUNTABILITAS KEUANGAN | 99 |
| PENUTUP | 104 |
| LAMPIRAN | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Kemudian dalam proses perkembangannya, amanat ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan pemenuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Selain itu, LKIP merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada masyarakat. Dalam hal ini, terinformasikan capaian kinerja dari seluruh sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Ciamis serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Pemerintah Kabupaten

Ciamis Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Struktur yang telah disederhanakan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah tetap yaitu sebanyak 28 Perangkat Daerah, 27 Kecamatan, 7 Kelurahan serta 118 Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Secara lebih jelas, susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- a.** Sekretariat Daerah;
- b.** Sekretariat DPRD;
- c.** Inspektorat;
- d.** Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 15. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 16. Satuan Polisi Pamong Praja.
 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Dinas Perhubungan; dan
 19. Dinas Pariwisata.
- e.** Badan, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 6. Badan Pendapatan Daerah

f. Kecamatan, terdiri atas:

1. Kecamatan Ciamis;
2. Kecamatan Cikoneng;
3. Kecamatan Cijeungjing;
4. Kecamatan Sadananya;
5. Kecamatan Cimaragas;
6. Kecamatan Panumbangan;
7. Kecamatan Cihaurbeuti;
8. Kecamatan Panjalu;
9. Kecamatan Kawali;
10. Kecamatan Cipaku;
11. Kecamatan Panawangan;
12. Kecamatan Jatinagara;
13. Kecamatan Rancah;
14. Kecamatan Cisaga;
15. Kecamatan Tambaksari;
16. Kecamatan Rajadesa;
17. Kecamatan Sukadana;
18. Kecamatan Banjarsari;
19. Kecamatan Lakbok;
20. Kecamatan Pamarican;
21. Kecamatan Cidolog;
22. Kecamatan Sindangkasih;
23. Kecamatan Baregbeg;
24. Kecamatan Sukamantri;
25. Kecamatan Lumbung;
26. Kecamatan Purwadadi; dan
27. Kecamatan Banjaranyar.

DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ciamis berjumlah 10.604 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-56 tahun yaitu sebanyak 45,4% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,3%

Kondisi ini memerlukan perhatian lebih terutama dalam melakukan perubahan mindset dan budaya organisasi untuk memberikan pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1. 2

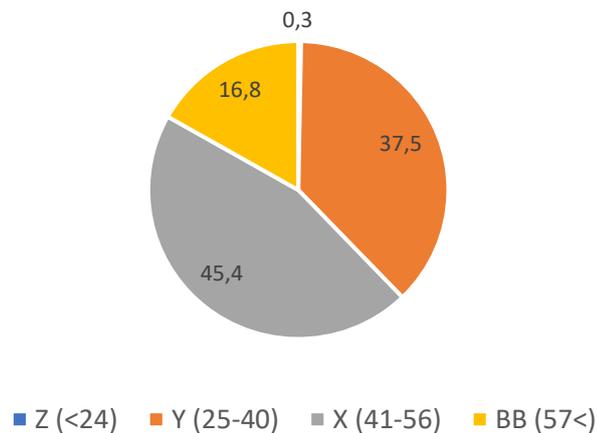
**Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023
Berdasarkan Usia**

| Generasi | Usia (Tahun) | Jumlah ASN (Orang) |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| Z (Gen Z) | <24 | 29 |
| Y (Milenial) | 25-40 | 3980 |
| X (Gen X) | 41-56 | 4812 |
| BB (Baby Boomer) | 57< | 1783 |
| JUMLAH | | 10.604 |

Sumber : SIMPEG BKPSDM Kab. Ciamis 2023

Grafik 1.1

Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023



Sumber : SIMPEG BKPSDM Kab. Ciamis 2023

Adapun Komposisi status pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

**Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023
Berdasarkan Usia**

| Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|----------------|--------|---------------|
| PNS | 7.093 | 66,9% |
| PPPK | 3.511 | 33,1% |
| Jumlah | | 10.604 |

Sumber : SIMPEG BKPSDM Kab. Ciamis 2023



ISU STRATEGIS

Memperhatikan Situasi Lingkungan Strategis Internasional, Nasional serta Regional. Terdapat 6 (Enam) Isu Strategis Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait pengembangan SDM antara lain masih rendahnya layanan dan kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh capaian APK untuk Pendidikan dasar khususnya tingkat SMP belum mencapai 100 persen, dan APM Pendidikan Dasar tingkat SD dan SMP yang belum mencapai 100 persen.

Selain permasalahan layanan dan mutu Pendidikan, permasalahan kesehatan di Kabupaten Ciamis pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, capaian kinerja beberapa indikator urusan kesehatan diantaranya presentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang, Angka Kematian Ibu. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang

disiplin dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, dan stunting.

Selanjutnya, saat ini pemberdayaan perempuan dan peran pemuda di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Ciamis sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan dan pemuda di Kabupaten Ciamis.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung melambat, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, yang semakin berdampak buruk terhadap perekonomian di seluruh belahan dunia termasuk Kabupaten Ciamis, Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi, walaupun kondisi di Kabupaten Ciamis masih lebih baik dibanding kondisi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan selalu menjadi isu global yang tidak pernah hilang dari muka bumi, dan menjadi salah satu perhatian Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada periode tahun 2016-2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang cukup baik yaitu mengalami penurunan, namun karena adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan adanya pandemi Covid-

19, maka jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis kembali meningkat, dan hal ini terjadi di seluruh daerah.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis cenderung fluktuatif, dimana tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan semakin bertambah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, banyaknya korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik dari luar maupun dalam daerah yang belum memiliki pekerjaan baru, serta kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor pemicu bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Ciamis.

4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan dan pengembangan wilayah. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kemantapan jalan kewenangan kabupaten, pada tahun 2016 sebanyak 66,787 persen jalan yang berada dalam kondisi mantap dari sepanjang 848,296 km jalan yang ada. Namun demikian, panjang jalan yang mengalami rusak berat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun, kecuali pada tahun 2020 kembali meningkat disebabkan adanya refocusing anggaran yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap penurunan pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa perlu dibarengi dengan terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata. Sistem transportasi publik yang mantap dan merata, harus dengan dibarengi oleh ketersediaan fasilitas lalu lintas yang dapat mendorong aksesibilitas antar wilayah dan distribusi barang/jasa.

Penanganan wilayah permukiman tidak layak huni dapat dilakukan melalui bantuan/fasilitas perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum, dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan daya saing daerah.

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan bencana

Perlu ada upaya untuk meningkatkan pembangunan lingkungan hidup agar dapat berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

TPB di Indonesia bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga

kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur harus tetap menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi antara Kawasan lindung dan Kawasan budidaya, sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Perubahan paradigma ilmu administrasi dari *Old Public Administration* menjadi *New Public Management* membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja birokrasi yang ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan. Pemerintah didorong untuk menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis antara lain : perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur; belum optimalnya pengelolaan kekayaan/asset pemerintah daerah dan pengelolaan asset/kekayaan daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; belum optimalnya kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat, provinsi dan desa/kelurahan; serta masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada Pemerintahan Desa antara lain: keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa.



SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang & maksud tujuan dalam penyusunan LKIP serta gambaran umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ciamis

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Mengulas Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2022, target perencanaan jangka menengah daerah, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 termasuk catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

An aerial, grayscale photograph of a large body of water. In the center, there is a large, forested island. The background shows a range of mountains under a clear sky. The foreground shows some buildings and a road near the water's edge.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



PERENCANAAN STRATEGIS

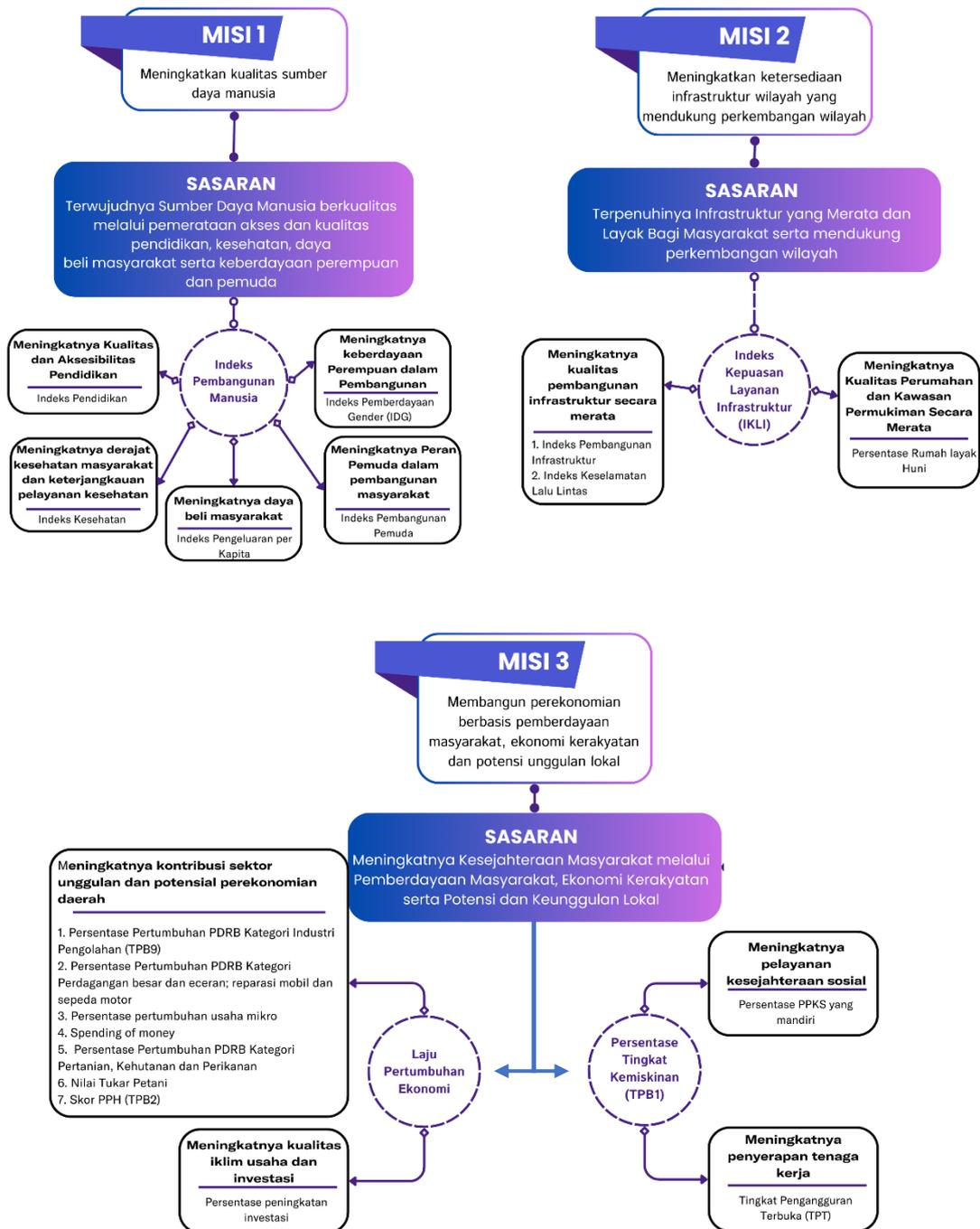
Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan merupakan tahun keempat yang bermakna perkembangan telah berjalan menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD. Pada Tahun 2022, dilakukan perubahan RPJMD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 termasuk terhadap target kinerja pembangunan.

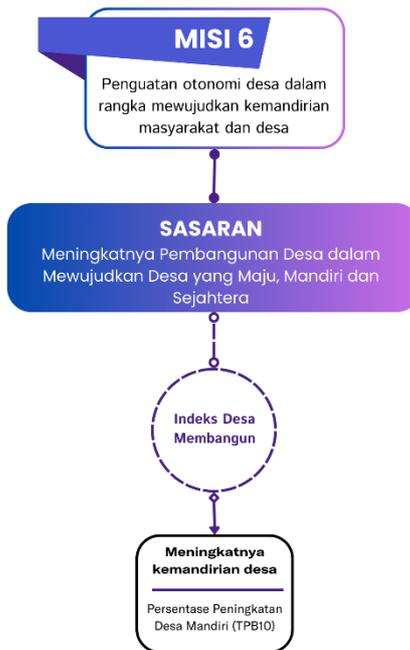
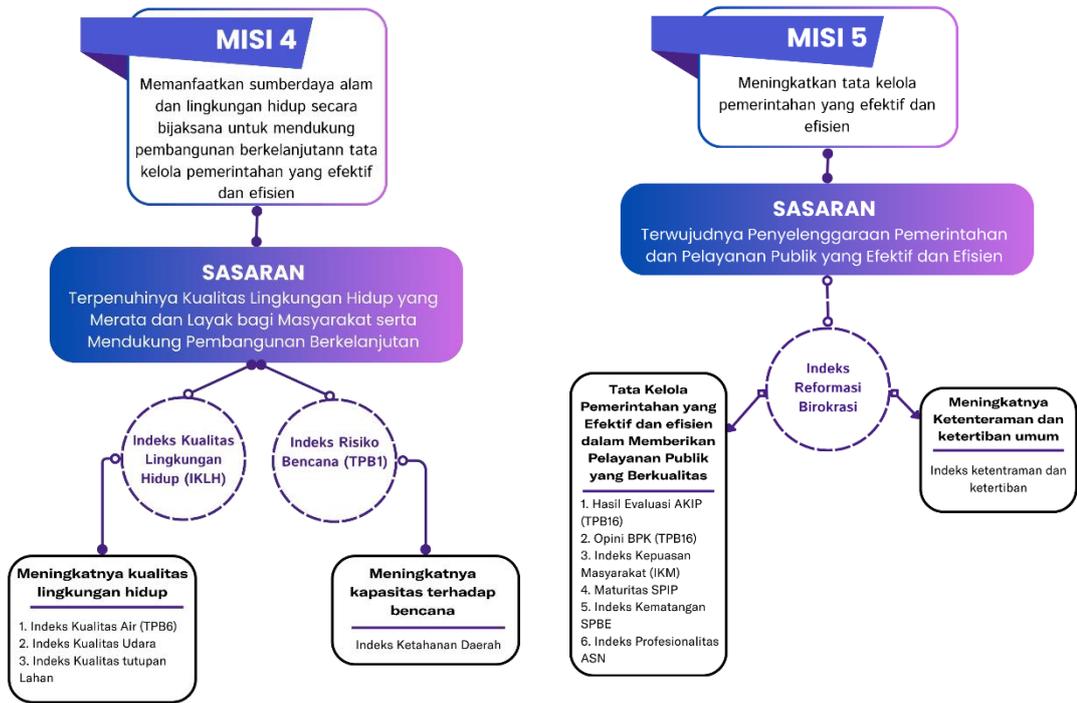
Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah visi Kabupaten Ciamis yang tetap konsisten dalam mewujudkan "Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua". Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan, diperlukan kreatifitas dan upaya bersama untuk membawa masyarakat Ciamis untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap memiliki 6(enam) misi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Enam Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis





Sumber : Perubahan RPJMD 2019-2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan dituangkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan, sebagaimana tabel berikut:

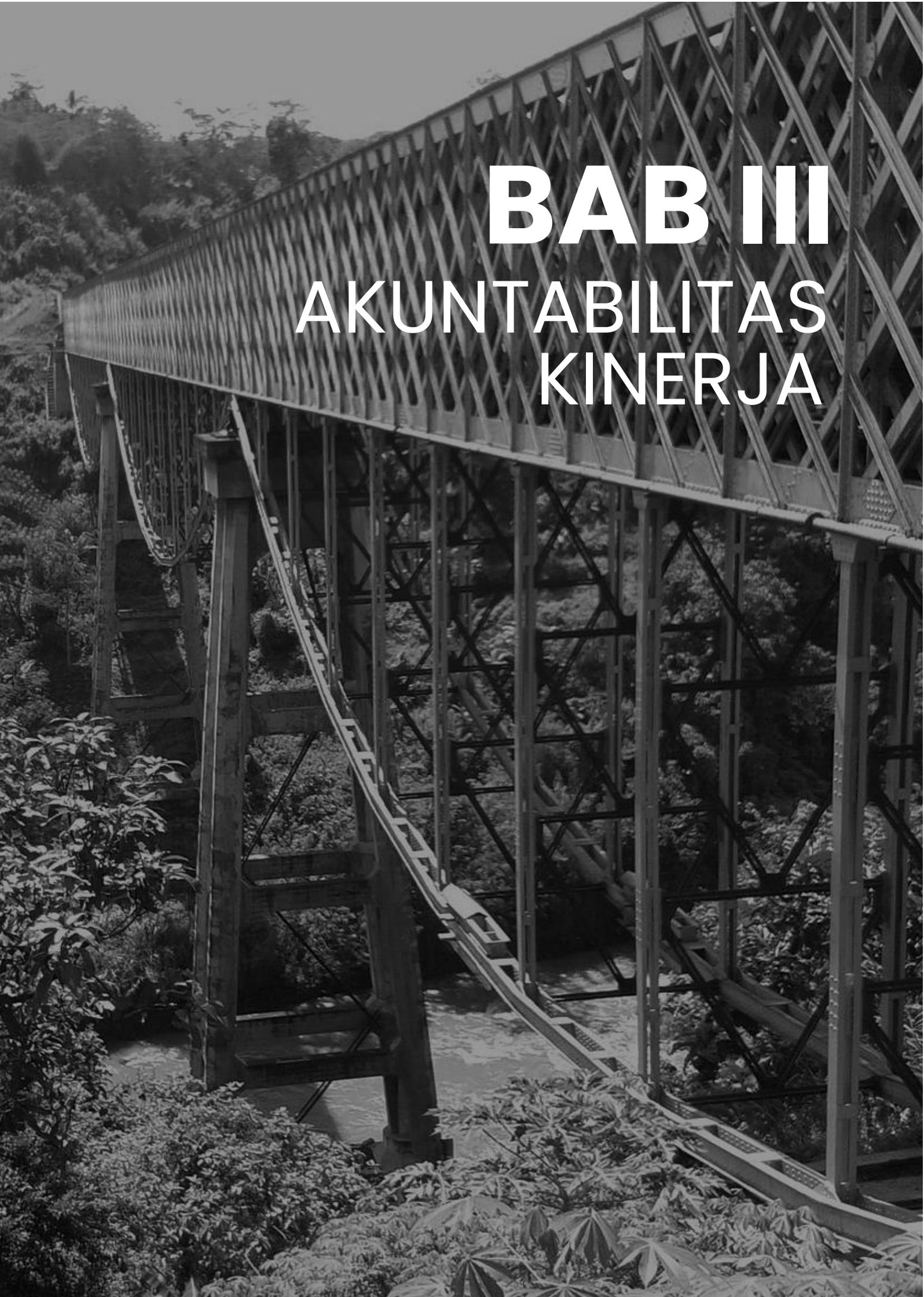
Tabel 2.1

Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan | Indeks Pendidikan | 67,34 |
| 2. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | Indeks Kesehatan | 80,50 |
| 3. | Meningkatnya daya beli masyarakat | Indeks Pengeluaran | 69,18 |
| 4. | Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) | 64,07 |
| 5. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks Pembangunan Infrastruktur | 81,940 |
| | | Indeks Keselamatan Lalu Lintas | 96,393 |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata | Persentase Rumah Layak Huni | 69,62 |
| 7. | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) | 5,68 |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi | 6,06 |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| | | Mobil dan Sepeda Motor | |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,86 |
| | | Nilai Tukar Petani (NTP) | 112,60 |
| 8. | Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi | Persentase Peningkatan Investasi | 5,50 |
| 9. | Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PPKS yang mandiri | 100 |
| 10. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,52 |
| 11. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (TPB6) | 59,75 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 81 |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 34,61 |
| 12. | Meningkatnya kapasitas terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0,7 |
| 13. | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas | Hasil Evaluasi AKIP (TPB16) | BB |
| | | Opini BPK (TPB9) | WTP |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik |
| 14. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10) | 19,23 |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1

**Data Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun
2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan | Indeks Pendidikan | 67,34 | 66,66 | 98,99% |
| 2. | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | Indeks Kesehatan | 80,50 | 84,55 | 105,03% |
| 3. | Meningkatnya daya beli masyarakat | Indeks Pengeluaran | 69,18 | 69,36 | 100,26% |
| 4. | Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) | 64,07 | 64,00 | 99,89% |
| 5. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks Pembangunan Infrastruktur | 81,940 | 83,82 | 102,29% |
| | | Indeks Keselamatan Lalu Lintas | 96,393 | 96,902 | 100,53% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan | Persentase Rumah Layak Huni | 69,62 | 69,62 | 100% |

| | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|---------|
| | Permukiman Secara Merata | | | | |
| 7. | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) | 5,68 | 3,35* | 59,98% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,06 | 5,15* | 84,98% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,86 | 1,22* | 42,66% |
| | | Nilai Tukar Petani (NTP) | 112,60 | 109,61 | 97,34% |
| 8. | Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi | Persentase Peningkatan Investasi | 5,50 | 13,36 | 242,91% |
| 9. | Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PPKS yang mandiri | 100 | 99,72% | 99,72% |
| 10. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,52 | 3,52 | 100% |

| | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 11. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (TPB6) | 59,75 | 60,34 | 100,99% |
| | | Indeks Kualitas Udara | 81 | 86,54 | 106,84% |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 34,61 | 59,45 | 171,77% |
| 12. | Meningkatnya kapasitas terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0,7 | 0,68 | 97,14% |
| 13. | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas | Hasil Evaluasi AKIP (TPB16) | BB (70,55) | B (69,30) | 98,23% |
| | | Opini BPK (TPB9) | WTP | WTP | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik (87,24) | Baik (88,27) | 101,18% |
| 14. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10) | 19,23 | 53,45 | 277,94% |
| Rata-rata | | | | | 115,65% |

*Angka Sangat Sementara, Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan namun capaian kinerja mengalami penurunan. Capaian Kinerja Indeks Pendidikan sebesar **98,99%** dengan realisasi sebesar **66,66 poin** target sebesar **67,34 poin**.

SASARAN 1:

Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan

Sasaran ini diukur oleh Indeks Pendidikan. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Pendidikan.



INDEKS PENDIDIKAN

Didukung

Program Pengelolaan Pendidikan

Realisasi
Rp218.703.847.513,00

Program Pengembangan Kurikulum

Realisasi
Rp400.000.000,00

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi
Rp15.560.427.500,00



Formulasi Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan diperoleh dari pelaksanaan pengukuran 2 (dua) Indikator yaitu : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------|--------|-----------|---------|
| RLS | 7,96 | 8,00 | 103,35 |
| HLS | 14,69 | 14,28 | 98,61 |

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **100,46%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **1,47%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **66,67 poin** dengan realisasi **66,66 poin** maka capaian Indeks Pendidikan sebesar **99,99%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **67,47 poin** dengan realisasi **66,66 poin** maka capaian kinerja Indeks Pendidikan tahun 2023 masih lebih rendah yaitu **98,80%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Indeks Pendidikan masih kurang **0,8 poin**.

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pendidikan Nasional sebesar **65,76 Poin** maka capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis lebih tinggi **0,9 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar **64,66 poin** Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis lebih tinggi **2,0 poin**.

Tidak tercapainya target Indeks Pendidikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun

2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal, (pendidikan dasar dan menengah) untuk kembali bersekolah sangat minim, dikarenakan rentang usia yang tidak muda lagi;
2. Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda beda, bahkan ada di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka enggan untuk kembali bersekolah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mendorong sekolah untuk meningkatkan pengisian data-data pendidikan melalui DAPODIK untuk mendapatkan bantuan BOS, Sarana Prasarana, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS.
2. Melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis yang belum mengenyam pendidikan formal, melalui kader-kader yang ditunjuk.

Adapun inovasi yang telah dilaksanakan, adalah:

1. IMMAS GEMMAS

Inovasi Implementasi Masif Gerakan Masyarakat Ayo Sekolah (Immas Gemas) merupakan program yang mengajak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ Sederajat untuk kembali bersekolah melalui program Paket Kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM yang bekerjasama dengan Desa yang ada di wilayahnya



Melalui inovasi IMMAS GEMMAS ini para peserta didik warga belajar tidak hanya serta merta mendapatkan pembelajaran dari segi akademisi nya saja, tetapi para peserta didik Kesetaraan juga mendapatkan pelatihan keterampilan, baik itu kerajinan tangan atau bahkan umkm disesuaikan minat bakat peserta didik.

IMMAS GEMMAS menjadi Juara II pada Lomba Inovasi Daerah



Kabupaten Ciamis Kategori ASN Tahun 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis.



2. Program Beasiswa Miskin

Kegiatan pemberian beasiswa miskin bagi siswa yang tidak mampu, untuk menghindari adanya Drop Out siswa yang sedang sekolah. Pemberian beasiswa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis, juga sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan drop out baik sekolah negeri maupun sekolah swasta dari keluarga tidak mampu.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pendidikan meliputi 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan tenaga Kependidikan.

Sisa anggaran dari 3(tiga) program tersebut sebesar **11,13%** atau **Rp29.385.473.213,00**. Pengukuran ini dari realisasi sebesar **Rp234.664.275.013,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp264.049.748.226,00**, atau capaian **88,87%**.

Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menunjukkan tren naik. Capaian Kinerja Indeks Kesehatan sebesar **105,03%** dengan realisasi sebesar **84,55 poin** target sebesar **80,50 poin**

SASARAN 2:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

Sasaran ini diukur oleh Indeks Kesehatan. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Kesehatan.



Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

| | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Realisasi 2021 | ↓↑ | Capaian 2021 | ↓↑ |
| 79,74 | +4,81 | 100 | +5,03 |
| Realisasi 2022 | ↓↑ | Capaian 2022 | ↓↑ |
| 80,46 | +4,09 | 100,60 | +4,43 |

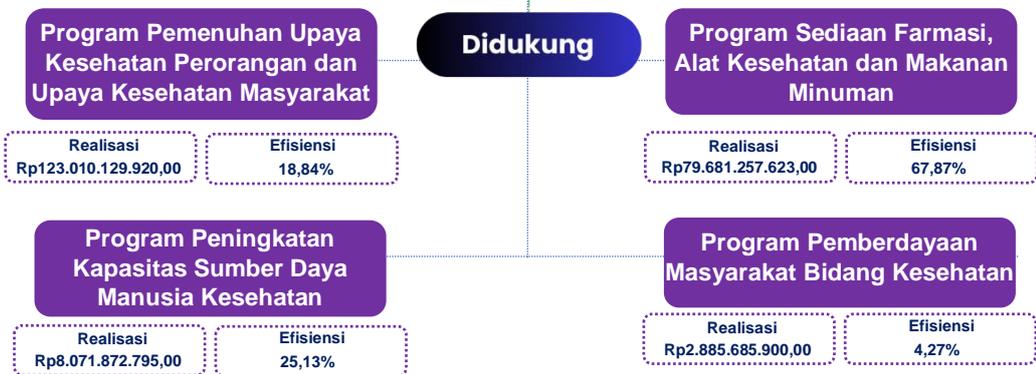
Perbandingan dengan target akhir RPJMD

| | |
|-------------|------------------------|
| Target 2024 | Capaian terhadap RPJMD |
| 80,46 | 105,08% |

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

| | |
|--------------------|-----------------|
| Realisasi Nasional | Capaian Kinerja |
| 82,97 | 101,90% |
| Realisasi Provinsi | Capaian Kinerja |
| 84,48 | 100,08% |

INDEKS KESEHATAN



Formulasi Indeks Kesehatan

Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kesehatan dapat dihitung dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Usia Harapan Hidup (UHH)

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **100,60%**, naik sebesar **4,43%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **80,20 poin** dengan realisasi **84,55 poin** maka capaian Indeks Pendidikan sebesar **105,42%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **80,46 poin** dengan realisasi **84,55 poin** maka capaian kinerja Indeks Kesehatan tahun 2023 yaitu **105,08%** sudah melebihi target akhir Perubahan RPJMD.

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kesehatan Nasional sebesar **82,97 poin** maka capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis lebih tinggi **1,58 poin**. Demikian pula bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar **84,48 poin** Indeks Kesehatan Kabupaten Ciamis lebih tinggi **0,07 poin**. Oleh karena itu, perlu penyesuaian target PK tahun 2024 (harus lebih tinggi dari realisasi tahun 2023).

Keberhasilan Indeks Kesehatan Tahun 2023 baik dalam Perubahan Perjanjian Kinerja, Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, tingkat nasional dan tingkat

provinsi Jawa Barat karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:

1. Kebijakan dan perencanaan yang tepat;
2. Optimalisasi infrastruktur Kesehatan yang ada;
3. Kemitraan dan Kolaborasi;
4. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan kampanye penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya kesehatan perorangan dan kegiatan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan primer di berbagai wilayah;
3. Melakukan program deteksi dini dan pencegahan penyakit;
4. Memperkuat jejaring kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas dalam pelaksanaan program;
5. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan berkualitas;

6. Membangun sistem penghargaan dan insentif untuk meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan;
7. Meningkatkan distribusi dan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta makanan dan minuman sehat;
8. Menyusun mekanisme pengadaan yang efisien dan transparan untuk mengatasi keterbatasan stok;
9. Mengawasi kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang beredar;
10. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kesehatan dasar bagi masyarakat;
11. Menggunakan media sosial dan kampanye informasi untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat;
12. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan melalui forum komunitas dan kelompok.

Atas program unggulan dalam Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 telah memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat peringkat ke-1 (satu) pada kategori Persentase

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menerapkan Rekam Medis Elektronik (MRE)



Program yang mendukung pencapaian Indeks Kesehatan meliputi 4 (empat) program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Efisiensi anggaran dari 4(empat) program tersebut sebesar **12,41%** atau **Rp31.393.290.447,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp134.507.604.615,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp165.900.895.062,00** atau capaian **87,60%**.

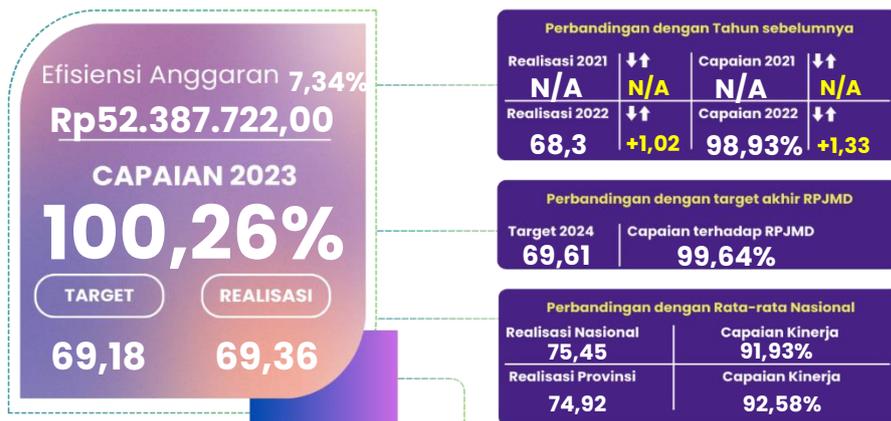
Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren meningkat. Capaian Kinerja Indeks Pengeluaran sebesar **100,26%** dengan realisasi sebesar **69,36 poin** dari target sebesar **69,1 poin**.

SASARAN 3:

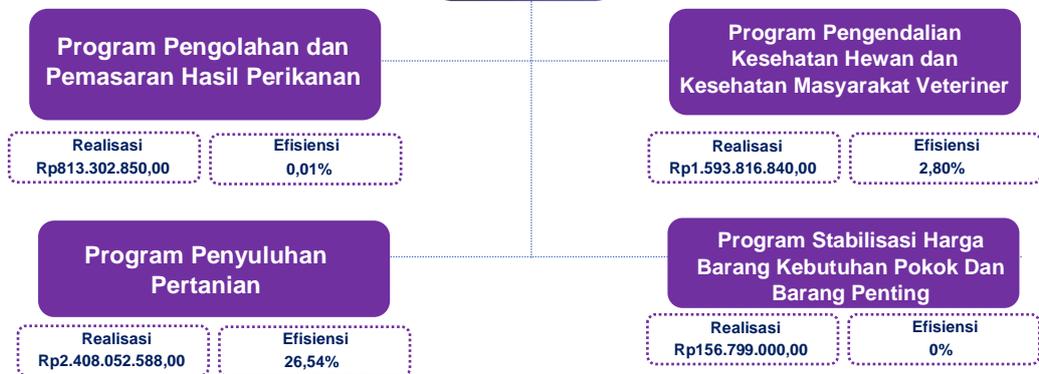
Meningkatnya daya beli masyarakat

Sasaran ini diukur oleh Indeks Pengeluaran. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan



INDEKS PENGELUARAN

Didukung



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Pengeluaran Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **98,93%**, naik sebesar **1,33%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **69,18 poin** dengan realisasi **69,36 poin** maka capaian Indeks Pengeluaran sebesar **100,26%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **69,61 poin** dengan realisasi **69,36 poin** maka capaian kinerja Indeks Pengeluaran tahun 2023 yaitu **99,64%**, atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Indeks Pendidikan masih kurang **0,25 poin**.

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pengeluaran Nasional sebesar **75,45 Poin** maka capaian Indeks Pengeluaran Kabupaten Ciamis lebih rendah **6,09 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pengeluaran Provinsi Jawa Barat sebesar **74,92 poin** Indeks Peengeluaran Kabupaten Ciamis lebih rendah **5,56 poin**.

Tercapainya Indeks Pengeluaran dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun

2023, karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:

1. Adanya bantuan benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian kepada para petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.
2. Ketersediaan prasarana pendukung pertanian (irigasi, embung, dam parit dan jalan usaha tani) mendorong optimalnya hasil produksi pertanian.
3. Adanya pendampingan pelaksanaan budi daya pertanian oleh para Penyuluh Pertanian

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mendorong peran Perumda untuk bekerjasama dengan koperasi produsen dalam rangka memperpendek rantai distribusi
2. Melaksanakan pendampingan dan penyuluhan terhadap Kelompok Tani untuk penerapan teknologi budi daya yang lebih baik.



Inovasi yang telah dilaksanakan, adalah:

Galuh Culinary Night Festival



Dalam meningkatkan Daya Beli Masyarakat melalui kerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengadakan Galuh Culinary Night dengan mewadahi para pegiat usaha kuliner Ciamis sekaligus menjawab aspirasi warga yang menginginkan adanya event kuliner terpusat di Ciamis yang digagas oleh Himpunan Perdagangan Kewirausahaan Ciamis.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pengeluaran per Kapita meliputi 4 (empat)

program, yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Efisiensi anggaran dari 4(empat) program tersebut sebesar 7,34% atau **Rp52.387.722,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp2.563.918.690,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp5.024.359.000,00** dengan capaian **99,23%**.

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif . Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar **99,89%** dengan realisasi sebesar **64,00 poin** target sebesar **64,07 poin**.

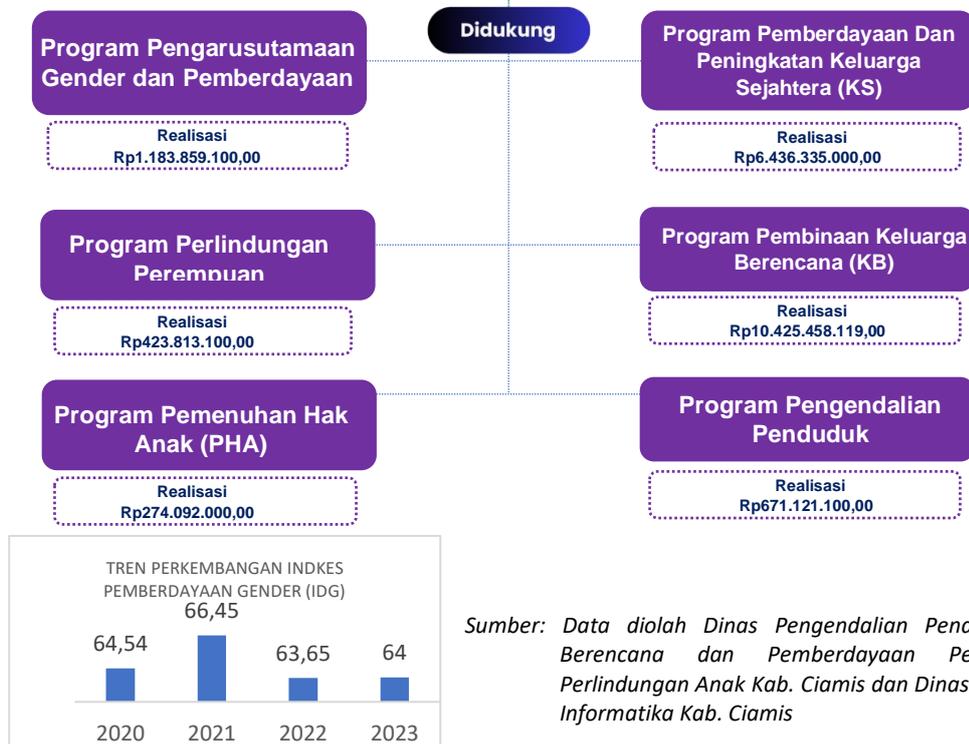
SASARAN 4:

Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran ini diukur oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)



Sumber: Data diolah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **99,50%**, naik sebesar **0,39%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **64,07 poin** dengan realisasi **64,00 poin** maka capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar **99,50%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **64,17 poin** dengan realisasi **64,00 poin** maka capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 masih lebih rendah yaitu **99,73%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih kurang **0,17 poin**.

Tidak tercapainya target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP KDRT);
2. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen,

pemerintahan, dan dunia usaha;

3. Belum optimalnya pembentukan Desa Layak Anak (14,34%) di Kabupaten Ciamis;
4. Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan;
5. Belum optimalnya sumber daya (keuangan, personal, dan sarana prasarana) yang responsive untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG);
7. Adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam lapangan kerja dan sektor ekonomi;
8. Terdapatnya tenaga kerja anak di bawah umur;
9. Masih adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan instansi vertikal terkait;

2. Melaksanakan kerja sama dengan organisasi profesi, organisasi Perempuan, dan dunia usaha;
3. Melaksanakan koordinasi dengan DPMD Kabupaten Ciamis dalam pembentukan Desa Layak Anak;
4. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Melaksanakan pendampingan dan tata laksana kasus terhadap keluarga yang mengalami kasus terhadap perempuan dan anak;
6. Mengajukan usulan pembentukan Kelembagaan/UPTD PPPA
7. Mengoptimalkan pengusulan dalam penganggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana;
8. Melaksanakan edukasi dan pendekatan terhadap pemilik usaha yang memperkerjakan anak di bawah umur.

Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum tercapai secara optimal, dalam tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ciamis menerima penghargaan juara harapan 3(tiga) pada lomba Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) kategori Kabupaten tingkat Jawa Barat



Program yang mendukung pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meliputi 6 (enam) program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pengendalian Penduduk.

Sisa anggaran dari 6(enam) program tersebut sebesar **8,65%** atau **Rp1.288.882.631,00**. Pengukuran ini didapat dari realisasi sebesar **Rp19.414.678.419,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp20.703.561.050,00** atau capaian **91,33%**.

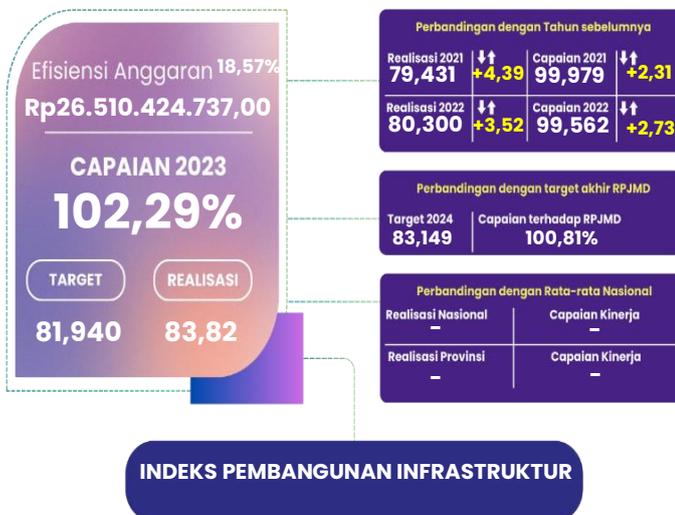
SASARAN 5:

Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata

Sasaran ini diukur oleh Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Indeks Keselamatan Lalu Lintas. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan & Dinas Perhubungan

| Rata-rata Capaian Sasaran 5 | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 99,99% | 97,29% | 101,18% |

Indeks Pembangunan Infrastruktur



Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren meningkat. Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar **102,29%** dengan realisasi sebesar **83,82 poin** dari target sebesar **81,94 poin**.

Didukung



Sumber: Data diolah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **99,562%**, naik sebesar **2,73%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **81,94 poin** dengan realisasi **83,82 poin** maka capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar **102,29%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **83,149 poin** dengan realisasi **83,82 poin** maka capaian kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 yaitu **100,81%** sudah melebihi **0,8 poin**. Oleh karena itu, perlu penyesuaian target PK tahun 2024 (harus lebih tinggi dari realisasi tahun 2023).

Tercapainya Indeks Pembangunan Infrastruktur dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:

1. Optimalnya dukungan pembiayaan untuk penanganan jalan dan jembatan kabupaten melalui bantuan keuangan provinsi.
2. Adanya pemeliharaan dan rehabilitasi pada daerah-

daerah irigasi teknis dan semi teknis kewenangan kabupaten sehingga kondisi daerah irigasi dapat dipertahankan.

3. Optimalnya dukungan pembiayaan untuk pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat (SPAM) melalui Dana Alokasi Khusus.
4. Optimalnya dukungan pembiayaan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah melalui Dana Alokasi Khusus
5. Telah terbitnya PERDA RTRW yang baru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah

1. Melaksanakan penanganan jalan dan jembatan berupa rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin jalan serta penggantian dan pemeliharaan jembatan.
2. Melaksanakan penanganan daerah irigasi teknis dan semi teknis kewenangan kabupaten berupa operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi, OP Sungai/saluran, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

3. Melaksanakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat (SPAM) di daerah-daerah yang memerlukan sarana air bersih dan air minum sesuai target SPM.
4. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Pengolahan Air Limbah setempat (SPAL-DS) sesuai target SPM.
5. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian tata ruang dan alih fungsi lahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Infrastruktur meliputi 7 (tujuh) program, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Perbaikan Jalan



Dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan peningkatan, perbaikan jalan sepanjang 180 Km dan Rehab berkala sepanjang 20,74 Km yang sudah dilaksanakan.

Normalisasi Sungai



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Ciamis melakukan sungai Cimantri dusun sindanghayu kec.banjarsari. Kegiatan normalisasi sungai untuk mengatasi terjadinya banjir.

Efisiensi anggaran dari 3(tiga) program tersebut sebesar **18,57%** atau **Rp26.510.424.737,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp409.602.213.318,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp436.112.638.055,00**, atau capaian **81,43%**.

Indeks Keselamatan Lalu Lintas

Indeks Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Indeks Keselamatan Lalu Lintas sebesar **100,53%** dengan realisasi sebesar **96,902 poin** dari target sebesar **96,393 poin**.



Sumber: Data diolah Dinas Perhubungan Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **95,02%**, capaian kinerja naik sebesar **7,11%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **96,393 poin** dengan realisasi **96,902 poin** maka capaian Indeks Keselamatan Lalu Lintas sebesar **100,53%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **96,736 poin** dengan realisasi **96,902 poin** maka capaian kinerja Indeks Keselamatan Lalu Lintas tahun 2023 telah melampaui target akhir Perubahan RPJMD sebesar **100,17%** atau lebih tinggi **0,17 poin**.

Oleh karena itu, perlu penyesuaian target PK tahun 2024 (harus lebih tinggi dari realisasi tahun 2023).

Tercapainya Indeks Keselamatan Lalu Lintas dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:

1. Terepenuhinya perlengkapan jalan (Rambu-rambu, PJU, Cermin Tikungan, Marka jalan, pagar pengaman, lampu isyarat, alat pengendali pemakai jalan);
2. Terepenuhinya alat uji kendaraan bermotor untuk kalibrasi;
3. Tingginya kesadaran dari pengusaha angkutan untuk melakukan uji kendaraan bermotor.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan, dan rehabilitasi penyediaan perlengkapan jalan
2. Optimalisasi dalam pelaksanaan pemeliharaan pengujian berkala alat uji kendaraan bermotor
3. Melakukan kerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) untuk pelaksanaan uji kendaraan bermotor

Program yang mendukung pencapaian Indeks Keselamatan Lalu-Lintas meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).



Adapun pelaksanaan dalam Indeks Keselamatan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

Kegiatan Rampcheck Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun baru

Kegiatan dilaksanakan guna memeriksa laik jalan kendaraan penumpang umum di terminal dan di pool bus guna memastikan kendaraan tersebut lulus dari segi teknis dan segi administrasi, sehingga menjadikan rasa aman,nyaman dan berkeselamatan bagi para penumpang serta bekerja sama dengan pihak BNN memeriksa para awak angkutan terbebas dari penyalahgunaan obat2an terlarang.

Kegiatan Monitoring Keselamatan Kapal

Kegiatan Monitoring keselamatan kapal yang beroperasi di situ lengkong panjalu yang bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Jawa barat, guna memastikan kapal dalam keadaan laik dan lulus dari segi teknis dan segi administrasi sehingga menjadikan rasa aman,nyaman dan berkeselamatan bagi para penumpang kapal.



Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum

Dilihat dari sektor transportasi khususnya ketersediaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum, tentu menjadi salah satu capaian sejauh mana Kabupaten Ciamis mampu memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan

terhadap masyarakat pengguna jalan, baik pada ruas-ruas jalan

Kabupaten, Provinsi, Nasional serta di wilayah perkotaan dan pedesaan. Optimalnya keberadaan penerangan jalan umum dan efektifnya ketersediaan penerangan jalan umum di seluruh wilayah adalah poin penting dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan.

Efisiensi anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **1,28%** atau **Rp377.982.302,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp29.040.253.798,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp29.418.236.100,00**, atau capaian **98,72%**.

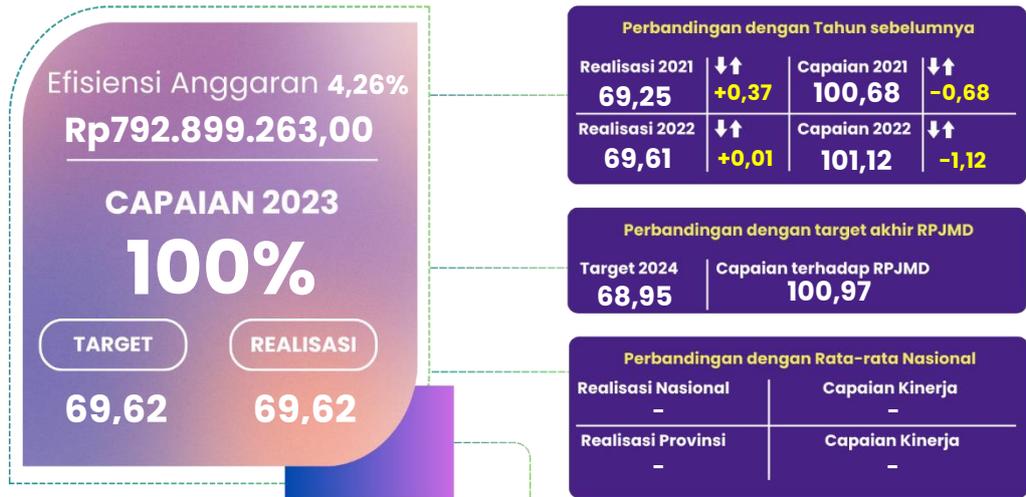
Persentase Rumah Layak Huni

Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren meningkat. Capaian Kinerja Persentase Rumah Layak Huni sebesar **100%** dengan realisasi sebesar **69,62 poin** dari target sebesar **69,62 poin**.

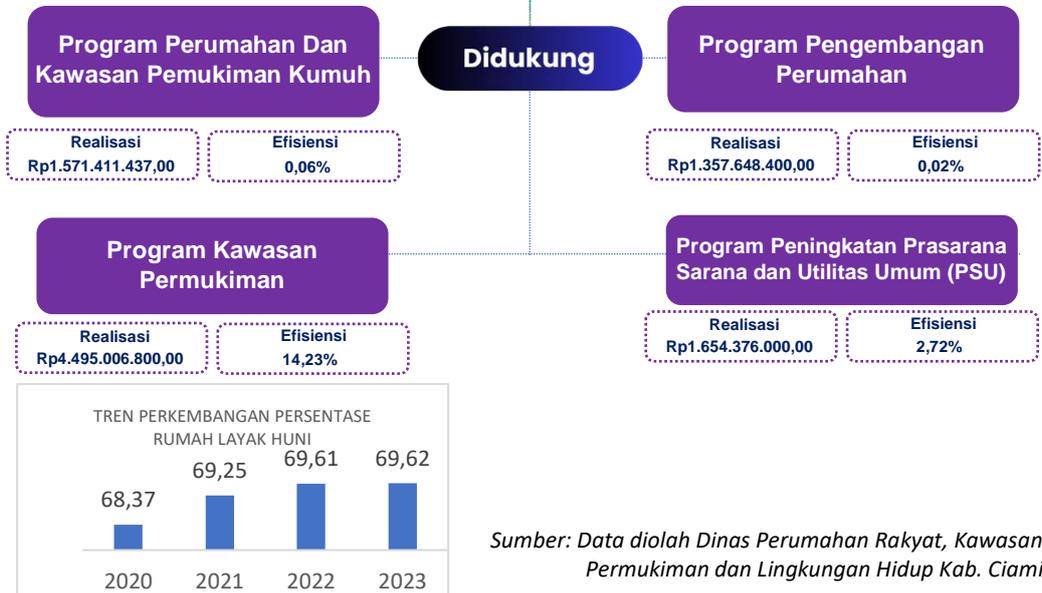
SASARAN 6:

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata

Sasaran ini diukur oleh Persentase Rumah Layak Huni. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI



Sumber: Data diolah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **101,12%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **1,12%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **68,89 poin** dengan realisasi **69,62 poin** maka capaian Persentase Rumah Layak Huni sebesar **101,06%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **68,95 poin**, capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni tahun 2023 telah melampaui sebesar **100,97%** atau lebih tinggi **0,67 poin**. Oleh karena itu, perlu penyesuaian target PK tahun 2024 (lebih tinggi dari realisasi tahun 2023).

Tercapainya Persentase Rumah Layak Huni dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, adalah:

1. Optimalnya pendampingan dan pelaksanaan penanganan rutilahu dalam proses verifikasi kesiapan penerima sampai dengan;
2. Dukungan lingkungan dan Pemerintah Desa dalam membantu swadaya penyelesaian rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Adapun upaya-upaya (rencana aksi) yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan stakeholder Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Ciamis dalam rencana penanganan rumah tidak layak huni agar tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.

Dalam meningkatkan Persentase Rumah Layak Huni dilakukan kegiatan sebagai berikut:

BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)



BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum

Terdapat 4 (empat) program yang mendukung pencapaian Persentase Rumah Layak Huni yaitu Program Perumahan Dan

Kawasan Pemukiman Kumuh, Program Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Efisiensi anggaran dari 4(empat) program tersebut sebesar **4,26%** atau **Rp792.899.263,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp9.078.442.637,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp9.871.341.900,00**, atau capaian **95,74%**.

SASARAN 7:

Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah

Sasaran ini diukur oleh 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9), Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Nilai Tukar Petani (NTP). Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan & Dinas Pertanian dan Ketahanan.

| Rata-rata Capaian Sasaran 7 | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 90,79%% | 98,50% | 70,99%* |

*Angka Sangat Sementara

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)

Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) sebesar **58,98%** dengan realisasi sebesar **3,35 poin*** target sebesar **5,68 poin**



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2024)

*Angka sangat sementara,

Jika dibandingkan dengan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **123,86%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **42,44%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **5,68 poin** dengan realisasi **3,35 poin*** maka capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) sebesar **58,98%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **5,67 poin** maka capaian kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) tahun 2023 belum mencapai target akhir yaitu **59,08%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) masih kurang **2,32 poin**.

Tidak tercapainya target Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan:

1. Kualitas dan kreatifitas pelaku usaha IKM relatif masih rendah;
2. Masih adanya Pelaku IKM yang belum memahami strategi dan proses pemasaran produk IKM;
3. Kemampuan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi pelaku IKM masih relatif rendah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada IKM;
2. Mengikuti Pameran Dagang dan Promosi Produk Unggulan Kabupaten Ciamis;
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku IKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk IKM dengan memberikan fasilitas kemitraan (E-Commerce).



Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) adalah:

1. Bimbingan Teknis Produksi Abon Ikan Lele



Bimbingan Teknis dalam pengelolaan UMKM produksi abon ikan lele di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari pada Bulan Juni 2023 dengan peserta bimbingan masyarakat Desa Kaso Kecamatan Tambaksari.

2. Monitoring industri Tekstil



DKUKMP Kab. Ciamis melaksanakan kegiatan monitoring industri tekstil di CV.Chuang Mandiri Kec. Purwadadi.



3. Monitoring Industri Makanan Olahan



Monitoring industri makanan olahan susu kambing di Kec. Baregbeg pada bulan Mei 2023.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan meliputi 2 (dua) program, yaitu Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun penyerapan anggaran sebesar **Rp563.943.000,00** atau **100%** daripagu anggaran sebesar **Rp563.943.000,00**.

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar **84,98%** dengan realisasi sebesar **5,15 poin** dari target sebesar **6,06 poin**.



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2024)

*Angka sangat sementara,

Jika dibandingkan dengan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar **99,5%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **14,52%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **6,06 poin** dengan realisasi **5,15 poin** maka capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar **84,98%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **6,17 poin** maka capaian kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 belum mencapai target yaitu **83,49%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih kurang **1,02 poin**.

Tidak tercapainya target Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelaku usaha ekspor (eksportir) di Kabupaten Ciamis;

2. Pengembangan dan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya minat investor untuk berusaha di Kabupaten Ciamis.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan ekspor bagi UMKM bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Perdagangan;
2. Melaksanakan pendampingan bagi UMKM terkait pengembangan produksi, manajerial, promosi dan pemasaran;
3. Mendorong terbukanya peluang investasi untuk menarik investor menanamkan modal dan berusaha di Kabupaten Ciamis melalui kegiatan temu bisnis dan forum investasi.
4. Mendorong peran serta organisasi pengusaha dan stakeholder lainnya dalam pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis.

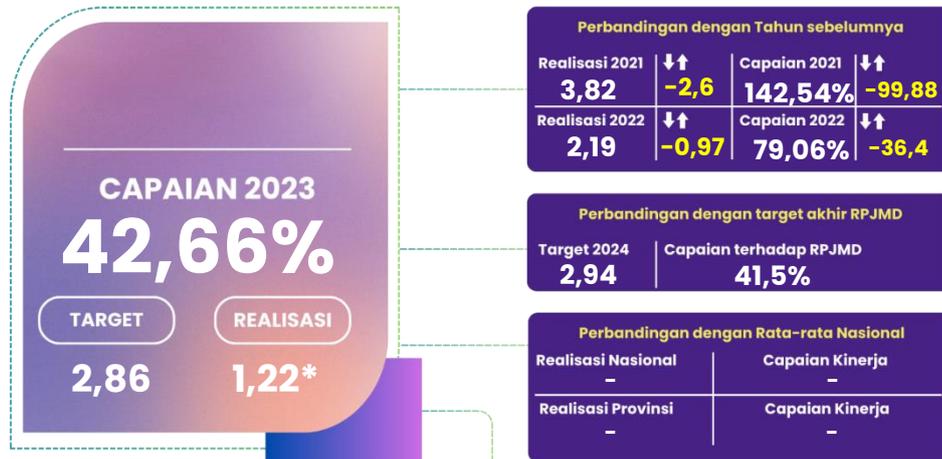
Program yang mendukung Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi 4 (empat)

program, yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri dan Program Pengembangan Ekspor.

Sisa anggaran dari 4(empat) program tersebut sebesar **1,33%** atau **Rp8.346.500,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp1.511.046.900,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.519.393.400,00**, atau capaian **98,67%**.

3. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar **84,98%** dengan realisasi sebesar **5,15 poin** dari target sebesar **6,06 poin**.



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2024)

*Angka sangat sementara,

Jika dibandingkan dengan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar **79,06%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **36,4%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **2,86 poin** dengan realisasi **1,22 poin** maka capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar **42,66%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **2,94 poin** maka capaian kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2023 belum mencapai target akhir yaitu **41,5%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih kurang **1,72 poin**.

Tidak tercapainya target Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penggunaan benih unggul oleh Petani;
2. Masih terdapat saluran irigasi yang tidak layak;
3. Tingginya serangan hama penyakit tumbuhan;
4. Teknologi Budidaya perikanan masih secara tradisional;
5. Teknologi Budidaya peternakan masih secara tradisional.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyalurkan bantuan benih unggul bersertifikat;
2. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi;
3. Melaksanakan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
4. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya perikanan berbasis teknologi ;
5. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya peternakan berbasis teknologi.



Meskipun Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan belum tercapai secara optimal, dalam tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ciamis menerima beberapa penghargaan seperti

Satya Lencana Wira Karya



Penghargaan Tertinggi Bidang Pembangunan Pertanian 'Satya Lencana Wira Karya' dari Presiden RI.

P4S berprestasi Tingkat Nasional



P4S berprestasi Tingkat Nasional yang diterima oleh P4S Karang Sari dari Kementerian Pertanian RI.



Juara 3 Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis berhasil sabet juara 3 pada lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga (vitamin dan mineral) Tahun 2023.

Program yang mendukung Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi 5 (lima) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan

Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sisa anggaran dari 5(lima) program tersebut sebesar **5,49%** atau **Rp1.751.294.560,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp30.160.084.040,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp31.911.378.600,00**, atau capaian **94,51%**.

4. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani sebesar **97,34%** dengan realisasi sebesar **109,61 poin** dari target sebesar **112,6 poin**.



Sumber : 1. BPS RI
2. BPS Provinsi Jawa Barat
3. Data diolah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **91,59%**, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar **5,75%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **112,6 poin** dengan realisasi **109,61 poin** maka capaian Nilai Tukar Petani sebesar **97,34%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **112,8 poin** maka capaian kinerja Nilai Tukar Petani tahun 2023 belu mencapai yaitu **97,17%** atau masih kurang **3,19 poin**.

Bila dibandingkan dengan capaian Nilai Tukar Petani Nasional sebesar **117,76 poin** maka capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Ciamis lebih rendah **8,15 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat sebesar **109,43 poin** Nilai Tukar Petani Kabupaten Ciamis lebih tinggi **0,18 poin**.

Tidak tercapainya Nilai Tukar Petani dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penggunaan benih unggul oleh Petani;
2. Masih terdapat saluran irigasi yang tidak layak;
3. Tingginya serangan hama penyakit tumbuhan;
4. Penerapan teknologi budidaya yang kurang optimal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyalurkan bantuan benih unggul bersertifikat;
2. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi;
3. Melaksanakan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
4. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap kelompok tani untuk penerapan budidaya yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan;

Program yang mendukung Nilai Tukar Petani meliputi 5 (lima) program, yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Sisa anggaran dari 5 (lima) program tersebut sebesar **4,51%** atau **Rp386.996.822,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp17.795.161.578,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp18.182.158.400,00** atau capaian **95,49%**.

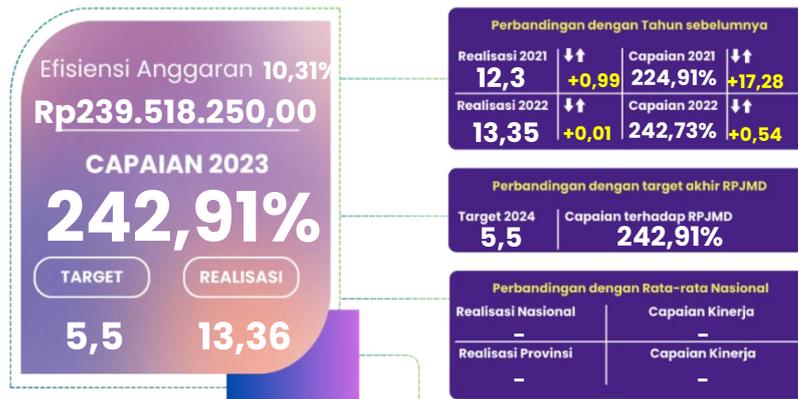
Persentase Peningkatan Investasi

Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren meningkat. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Investasi sebesar **242,91%** dengan realisasi sebesar **13,36 poin** dari target sebesar **5,5 poin**.

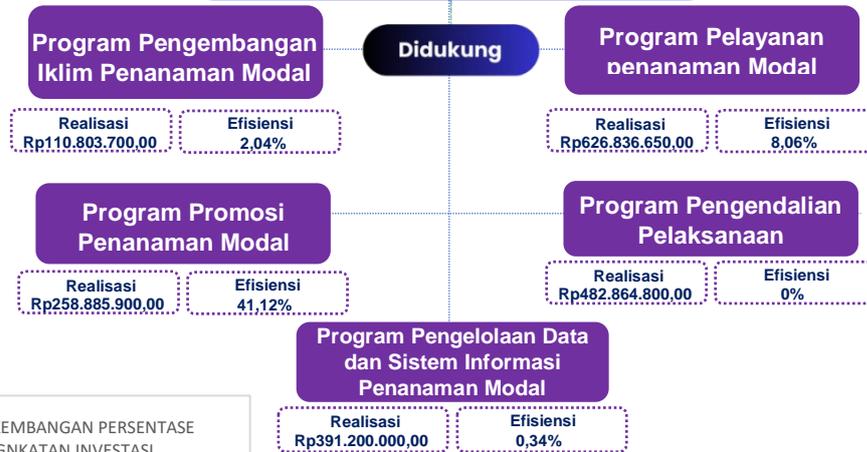
SASARAN 8:

Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

Sasaran ini diukur oleh Persentase Peningkatan Investasi Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI



Formulasi Presentase Peningkatan Investasi

Perhitungan target 5,5 pertahun ini ditetapkan berdasarkan nominal realisasi pada tahun sebelumnya dan realisasinya berdasarkan perhitungan rumus berikut:

$$\frac{Rp288.205.907.525 - Rp254.231.910.412}{Rp254.231.910.412} \times 100\% = 13,36\% \text{ atau } Rp33.973.997.412$$

Sumber : Data diolah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **242,73%**, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar **0,54%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **5,5 poin** dengan realisasi **13,36 poin** maka capaian Persentase Peningkatan Investasi sebesar **242,91%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **5,5 poin** maka capaian kinerja Persentase Peningkatan Investasi tahun 2023 lebih tinggi yaitu **98,80%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Persentase Peningkatan Investasi sudah tercapai melebihi **7,86 poin**. Perhitungan target pertahun ini ditetapkan berdasarkan nominal realisasi pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar **Rp254.231.910.113,00** sehingga target pada tahun ini **5,5 persen** dari **Rp254.231.910.113,00** adalah **Rp268.214.665.169,00** dan pada tahun ini dapat tercapai hingga **Rp288.205.907.525,00**. Dapat dikatakan bahwa target persentase peningkatan investasi ini secara nominal meningkat.

Tercapainya target Persentase Peningkatan Investasi dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi Daerah berupa PERDA No.5 tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha dan PERDA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
2. Tersedianya RUPM dan peta potensi penanaman modal
3. Terlaksananya pelayanan perijinan dan non perijinan yang tepat waktu
4. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan
5. Terlaksananya pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perijinan berbasis elektronik

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Upaya Peningkatan kegiatan promosi potensi daerah di dalam dan di luar daerah
2. Upaya penyesuaian RUPM dan peta potensi penanaman modal
3. Upaya peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
5. Upaya peningkatan pengelolaan data



Adapun kegiatan dalam meningkatkan Persentase Peningkatan Investasi, yaitu

Pelayanan Perizinan Keliling (PEPELING)



Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ciamis Jawa Barat jemput bola melayani pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), layanan secara jemput bola ini dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang ingin

membuat NIB. DPMPTSP Ciamis, saat ini sedang memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat dan untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, DPMPTSP mendatangi daerah-daerah di wilayah Kabupaten Ciamis dengan menggunakan mobil keliling.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Peningkatan Investasi meliputi 5 (lima) program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Efisiensi anggaran dari 5 (lima) program tersebut sebesar **10,31%** atau **Rp239.518.250,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp1.870.591.050,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.110.109.300,00** atau capaian **89,69%**.

Persentase PPKS yang Mandiri

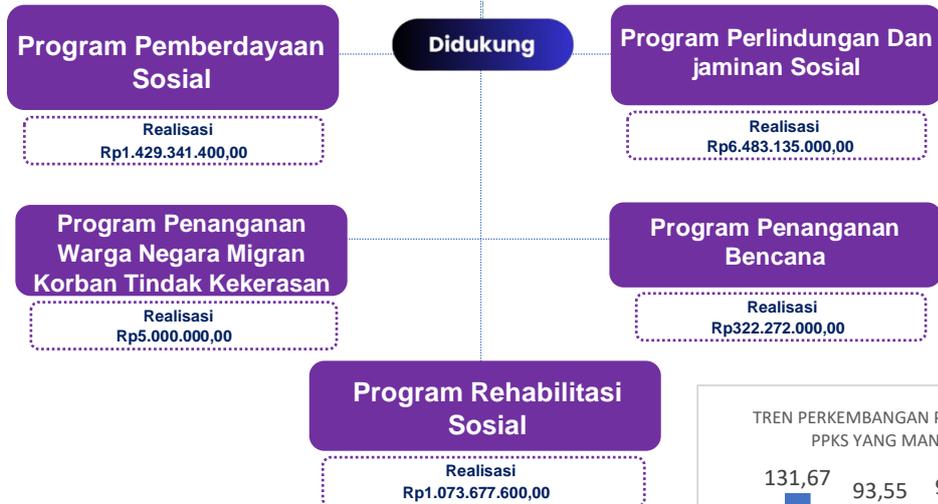
Persentase PPKS yang Mandiri Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren meningkat. Capaian Kinerja Persentase PPKS yang Mandiri sebesar **99,72%** dengan realisasi sebesar **99,72 poin** dari target sebesar **100 poin**.

SASARAN 9: Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

Sasaran ini diukur oleh Persentase PPKS yang Mandiri. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Sosial.



PERSENTASE PPKS YANG MANDIRI



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Jika dibandingkan dengan Persentase PPKS yang Mandiri Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **99,47%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **0,13%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **100 poin** dengan realisasi **93,55 poin** maka capaian Persentase PPKS yang Mandiri sebesar **93,55%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **100 poin** maka capaian kinerja Persentase PPKS yang Mandiri tahun 2023 masih lebih rendah yaitu **99,34%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Persentase PPKS yang Mandiri masih kurang **0,66 poin**.

Tidak tercapainya target Persentase PPKS yang Mandiri dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Bantuan tidak 100% terealisasi karena calon penerima bantuan meninggal dunia pada kondisi APBD Perubahan, sehingga tidak bisa diadakan perubahan SK calon penerima bantuan (KK Tunggal);

2. Tidak terdapat calon penerima santunan bagi warga negara migran yang meninggal karena korban kekerasan;
3. Sasaran telah mendapatkan bantuan hibah pada tahun 2022, sehingga bantuan tidak dapat diberikan lagi secara berkala pada tahun 2023;
4. Pengadaan gaji kebhincanaan tidak dapat terealisasi dikarenakan perubahan harga pasar.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima bantuan hibah dengan cermat;
2. Penganggaran Kembali melalui Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Adapun kegiatan yang membantu dalam Persentase PPKS yang Mandiri:

Inovasi Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (SI KISMIS)



Implementasi Inovasi Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (SI KISMIS) dengan melaksanakan pelayanan langsung kepada Masyarakat di Eks Kewedanaan Panumbangan pada Kegiatan Pepatah Manis di Kecamatan Panjalu.



Inovasi SI KISMIS telah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu sebagai juara 3 lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Ciamis, Top 50 Kompetisi Inovasi Tingkat Provinsi Jawa Barat, Juara 1 Program Quick Win terbaik mewakili Dimensi Society dalam Smart City Kabupaten Ciamis. Inovasi SI KISMIS telah terdaftar hak cipta di Kemenkumham Republik Indonesia.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Tahun 2023



Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Tahun 2023 di Kabupaten Ciamis bertempat di Halaman Dinas Sosial Ciamis. Bantuan tersebut di peruntukan bagi Buruh Tani dan Tembakau 120 orang, Buruh Pabrik Rokok 40 orang, Penderita Kanker 111 orang, Penderita Talasemia 138 orang, dan Penderita Hemodialisa 94 orang.



Bantuan Sosial Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023sd

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Simbolis kepada Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Dinas Sosial. Jumlah penerima Program Rutilahu sebanyak 322 unit.



Program yang mendukung pencapaian Presentasi PPKS yang Mandiri meliputi 5 (lima) program, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan, Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana.

Sisa anggaran dari 5 (lima) program tersebut sebesar **10,82%** atau **Rp307.135.000,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp9.313.426.000,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp9.620.561.000,00** atau capaian **89,08%**.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

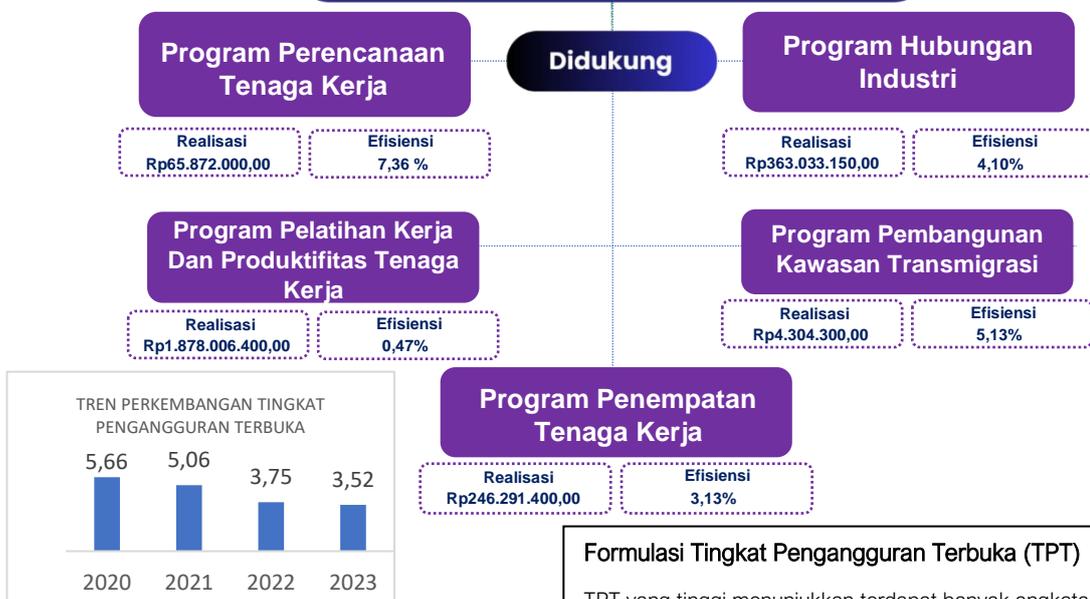
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar **100%** dengan realisasi sebesar **3,52 poin** dari target sebesar **3,52 poin**.

SASARAN 10: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Sasaran ini diukur oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Tenaga Kerja



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



Sumber : 1. BPS RI
 2. BPS Provinsi Jawa Barat
 3. BPS Kabupaten Ciamis

Formulasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT yang tinggi menunjukkan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, sebaliknya jika TPT yang rendah menunjukkan banyak angkatan kerja yang terserap di pasar kerja

Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **122,04%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **22,04%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **4,72 poin** dengan realisasi **3,52 poin** maka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar **125,42%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **4,63 poin** maka capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 yaitu **98,80%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melebihi **0,23 poin**.

Grafik 3.1

Tingkat Pengangguran Terbuka se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Bila dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar **5,32 poin** maka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis lebih rendah **1,8 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat sebesar **7,44 poin** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis lebih rendah **3,92 poin**.

Tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kerja sama dengan melibatkan stakeholder terkait perluasan kesempatan kerja;
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja/pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan job fair dengan Perusahaan;
2. Mempublikasikan informasi lowongan kerja di sosial media;
3. Membuat perjanjian kerja sama (MOU) untuk penempatan langsung di Perusahaan;
4. Melaksanakan pelatihan kerja bidang menjahit, otomotif, Pengolahan Hasil Pertanian (PHP), Tata Rias Wajah, Komputer, Talikur (Kerajinan), Las Listrik, Barista, Pembuatan Pakan Ikan, Budidaya Ikan.

Dalam mendukung pelaksanaan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dilakukan kegiatan berikut:

Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ini adalah guna meningkatkan sumber daya manusia, keterampilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan penyelenggaraan pelatihan ini memberikan tambahan ilmu, dan diharapkan mampu terciptanya tenaga kerja baru sesuai dengan jenis keterampilan/usahanya untuk meningkatkan taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.





Program yang mendukung pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi 5 (lima) program, yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industri dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Efisiensi anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **4,04%** atau **Rp37.875.482,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp2.557.507.250,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.595.382.732,00** atau capaian **95,96%**.

SASARAN 11:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

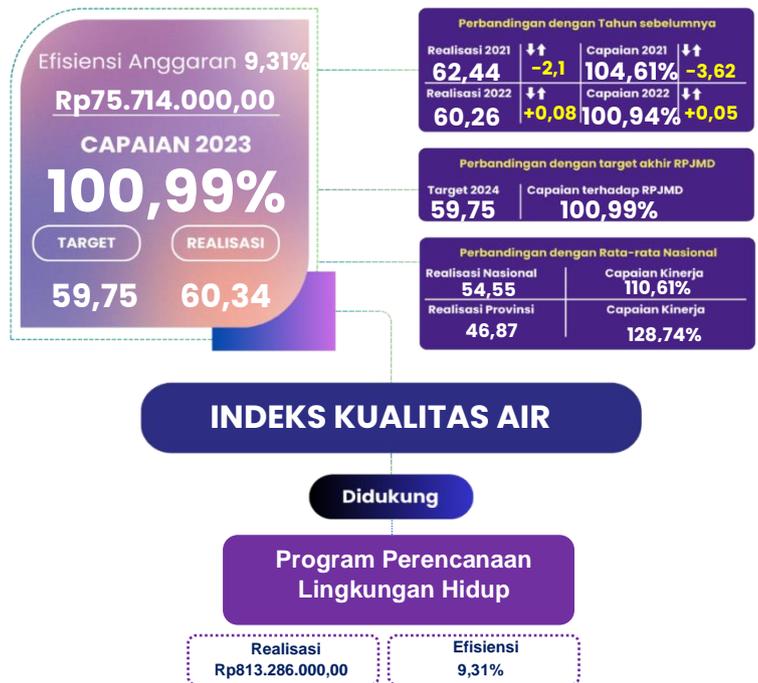
| Rata-rata Capaian Sasaran 11 | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 101,99% | 124,39% | 126,53% |

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air sebesar **100,99%** dengan realisasi sebesar **60,34 poin** target sebesar **59,75 poin**.

Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar **100,94%**, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar **0,05%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **59,73 poin** dengan realisasi **60,34 poin** maka capaian Indeks Kualitas Air sebesar **100,98%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **59,75 poin**

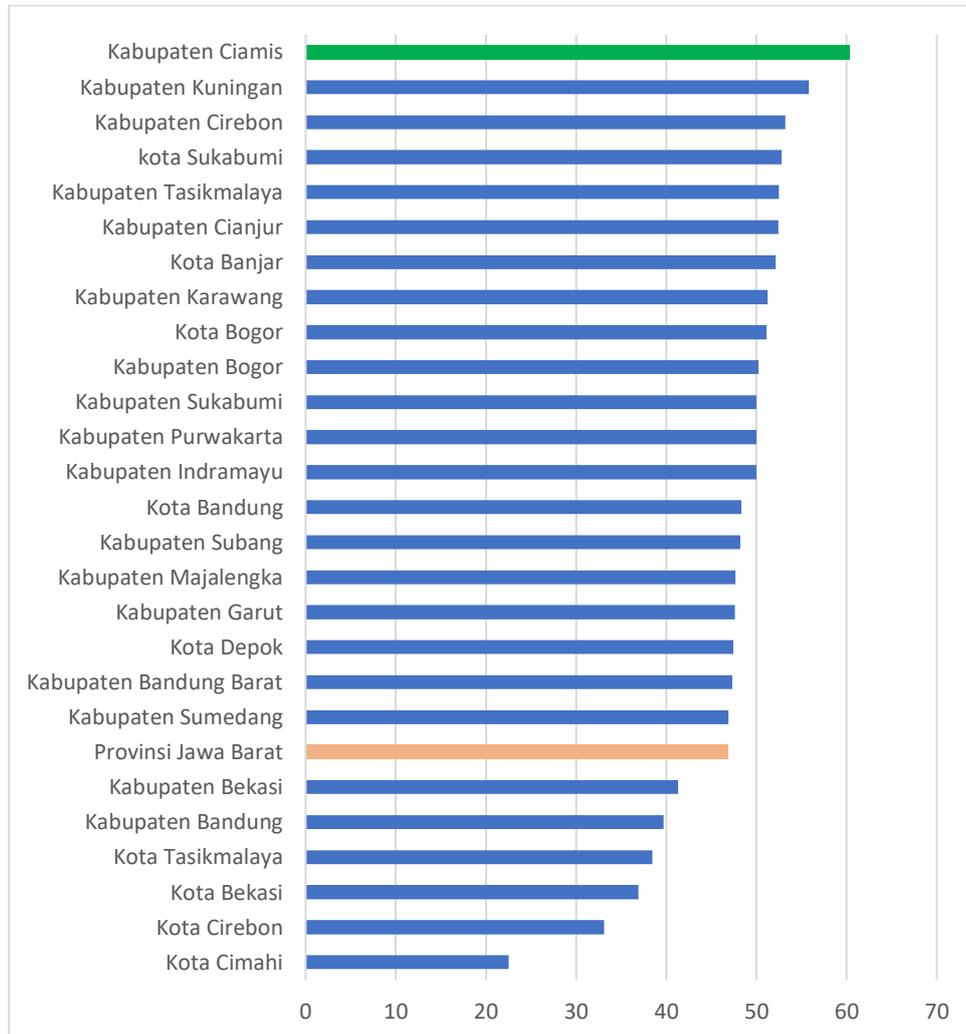


Sumber : Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

maka capaian kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2023 melebihi target akhir yaitu **100,99%** atau lebih tinggi **0,59 poin**.

Grafik 3.2

Indeks Kualitas Air se-Provinsi Jawa Barat tahun 2023



Sumber: Penyampaian Hasil IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Air Nasional sebesar **54,55 Poin** maka capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Ciamis lebih tinggi **5,97 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Air Provinsi Jawa Barat sebesar **46,87 poin** Indeks Kualitas Air Kabupaten Ciamis lebih tinggi **13,47 poin**. Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Ciamis bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menduduki posisi tertinggi.



Tercapainya Indeks Kualitas Air dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya faktor pendukung yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi penanganan air limbah perlu dioptimalkan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan berupa pembinaan atau sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup terutama pembuatan ipal sekala rumah tangga dan industri.

Kegiatan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air adalah:

1. Pembinaan, Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Pelaku Usaha dan atau Kegiatan

Kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pencegahan timbulan sumber pencemaran air permukaan di Kabupaten Ciamis yang berasal dari aktifitas kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga dapat terdeteksi sejak awal dan informasi dapat tersampaikan sebagai upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadi pencemaran.

2. Kegiatan verifikasi lapangan Dokumen Standar Teknis Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) ini merupakan satu upaya lainnya dalam pengendalian pencemaran di wilayah perairan. Setiap pelaku usaha atau industri yang melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan limbah hasil produksi berupa limbah cair yang dibuang ke Badan Air Permukaan, maka wajib membuat Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Yang dibuang ke Badan Air Permukaan. Isi Dokumen Pertek ini menerangkan upaya atau mekanisme instalasi dari pengelolaan limbah cair yang akan diterapkan oleh industri agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air permukaan.

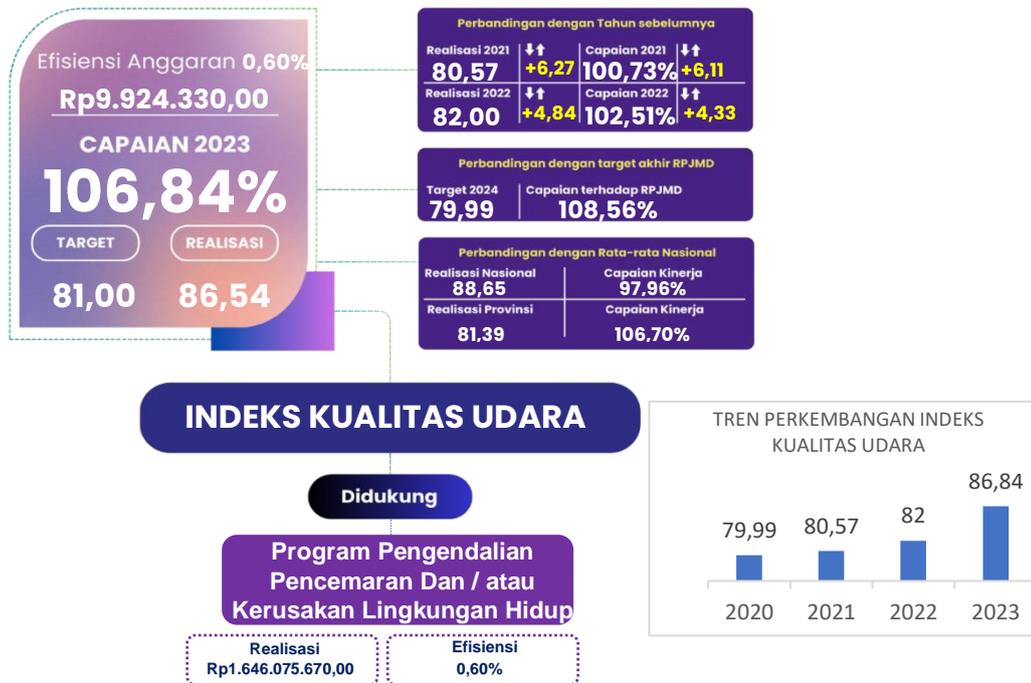


Program yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Air meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Efisiensi anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **9,31%** atau **Rp75.714,000,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp813.286.000,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp889.000.000,00** atau capaian **91,48%**.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar **106,84%** dengan realisasi sebesar **86,54 poin** target sebesar **81,00 poin**.



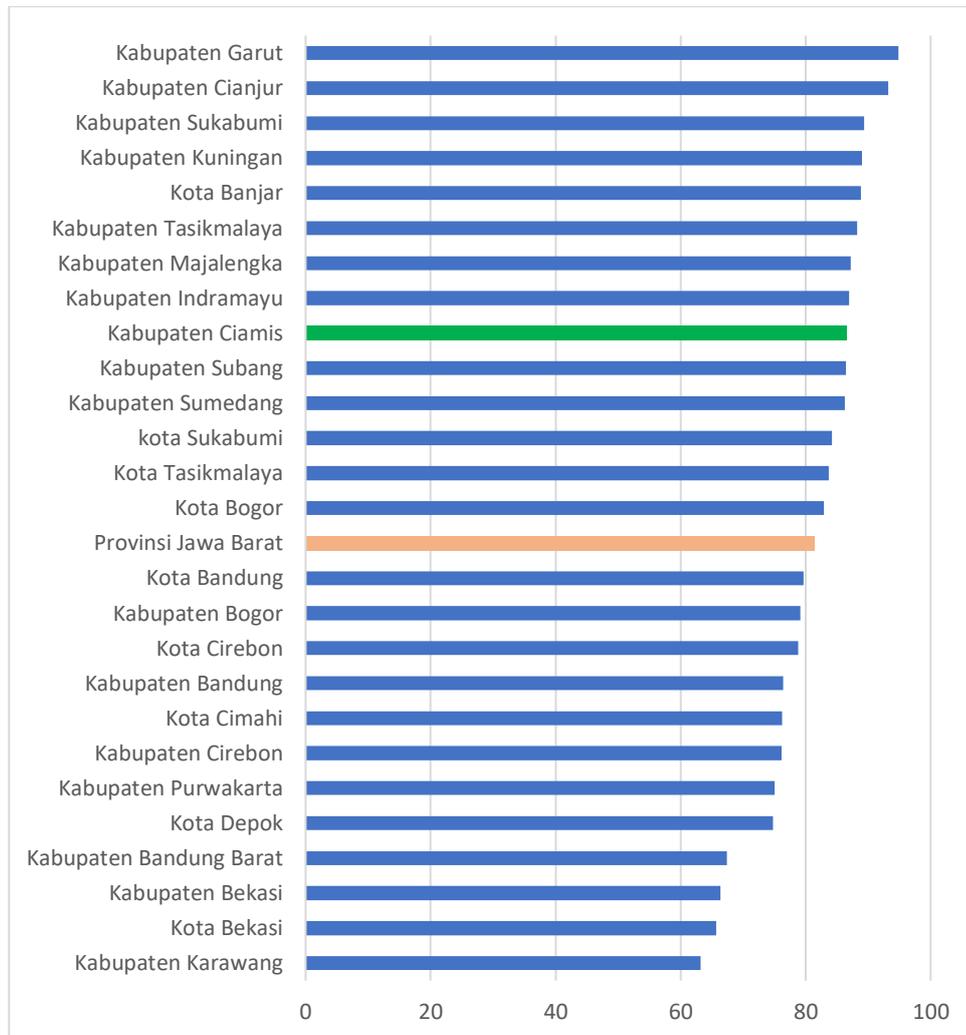
Sumber : Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **102,51%**, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar **4,33%**.

Jika dibandingkan dengan target target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **79,99 poin** dengan realisasi **86,54 poin** maka capaian Indeks Kualitas Udara sebesar **108,19%**, sama dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 yaitu **79,99 poin** maka capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2023 sudah yaitu **108,56%** atau melebihi **6,85 poin**.

Grafik 3. 3

Indeks Kualitas Udara se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara Nasional sebesar **88,65 poin** maka capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ciamis lebih rendah **1,81 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Jawa Barat sebesar **81,39 poin** Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ciamis lebih tinggi **5,45 poin**. Dengan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ciamis bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menduduki posisi ke sembilan.

Tercapainya Indeks Kualitas Udara dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
2. Laboratorium lingkungan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan no sertifikat LP-2669-IDN, sebagai Laboratorium Pengujian. Akreditasi dapat menaikkan citra positif sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pengelolaan sampah
3. Sosialisasi terhadap Masyarakat tentang program kampung iklim
4. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah
5. Pembinaan sejak dini kepada sekolah tentang sekolah berbudaya lingkungan
6. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Laboratorium lingkungan
7. Meningkatkan penyediaan sarana penunjang Laboratorium lingkungan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara, yaitu

Kegiatan verifikasi lapangan Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara

Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) ini merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran udara. Setiap pelaku usaha atau industri yang melakukan kegiatan produksi dan menghasil



limbah hasil produksi berupa emisi udara yang dibuang ke udara ambien, maka wajib membuat Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara. Isi Dokumen Pertek ini menerangkan upaya atau mekanisme instalasi dari pengelolaan Emisi Udara yang akan diterapkan oleh industri agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Udara meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Efisiensi anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **0,60%** atau **Rp9.924.330,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp1.646.075.670,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.656.000.000,00** atau capaian **99,40%**.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan namun capaian kinerja mengalami penurunan. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar **171,77%** dengan realisasi sebesar **59,45 poin** dan target sebesar **34,61 poin**.



INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN



Sumber : Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

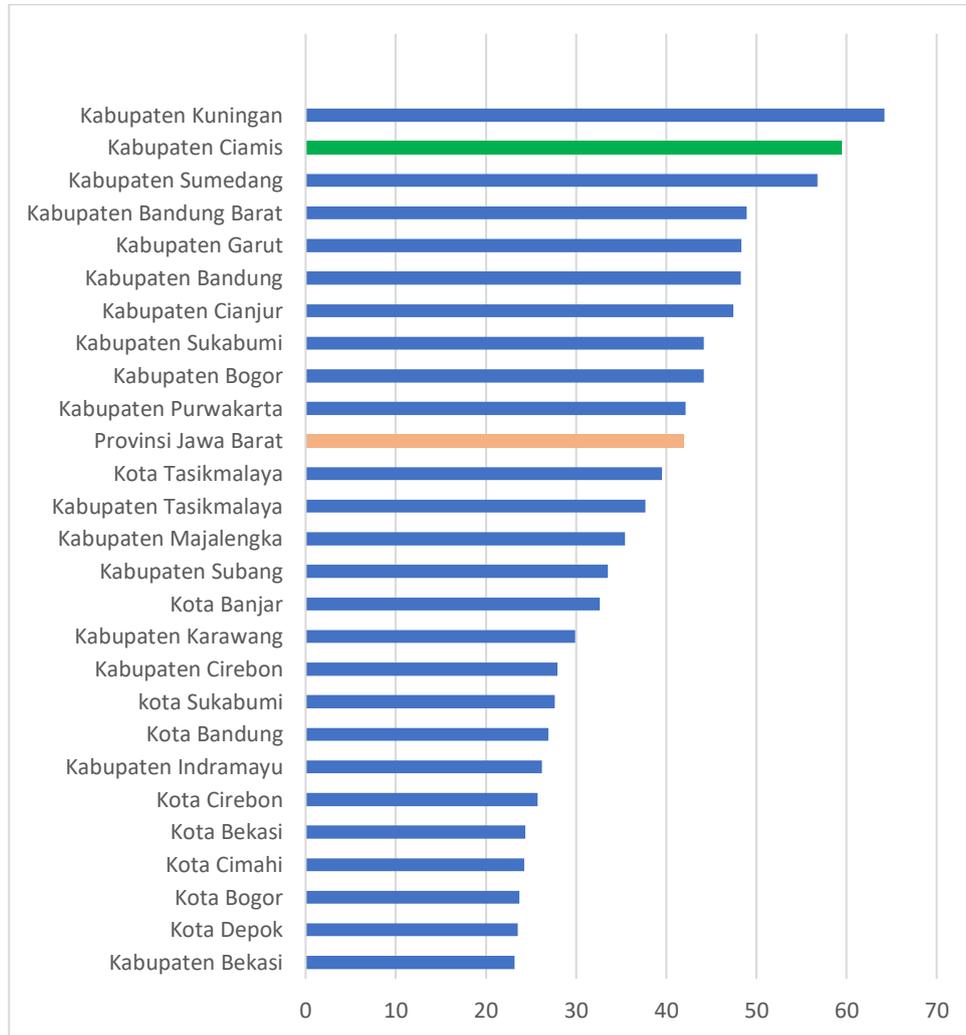
Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **169,71%**, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar **2,06%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **34,61 poin** dengan realisasi **59,45 poin** maka capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar **171,77%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **34,62 poin** maka capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan

Lahan tahun 2023 sudah melebihi target yaitu **177,72%** atau melebihi **24,83 poin**.

Grafik 3. 4

Indeks Kualitas Lahan se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional sebesar **61,75 Poin** maka capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Ciamis lebih rendah **2,3 poin**. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat sebesar **41,98 poin** Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Ciamis lebih tinggi **17,47 poin**.

Tercapainya target Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya faktor pendukung seperti meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun kualitas air udara dan tanah diakibatkan oleh kegiatan manusia perlu ditangani dengan optimal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan penanaman kembali (reboisasi) lahan gundul.
2. Mengoptimalkan program kampung iklim.
3. Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Fasilitasi pengajuan penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat.
5. Pembinaan terhadap Masyarakat hukum adat (MHA).
6. Fasilitasi Rekomendasi izin lingkungan.

Adapun dalam meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, maka dilaksanakan kegiatan berikut:

Kegiatan Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya

Mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Diantaranya dilakukan melalui upaya mempertahankan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya yang telah ada, serta meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.



Program yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan meliputi 6 (enam) program, yaitu Program Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati (kehati), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MAH), Kearifan Lokal Dan Hak MAH yang terkait dengan PPLH, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.

Efisiensi anggaran dari 6 (enam) program tersebut sebesar **6,21%** atau **Rp1.124.209.460,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp14.692.198.190,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp15.816.407.650,00** atau capaian **95,08%**.

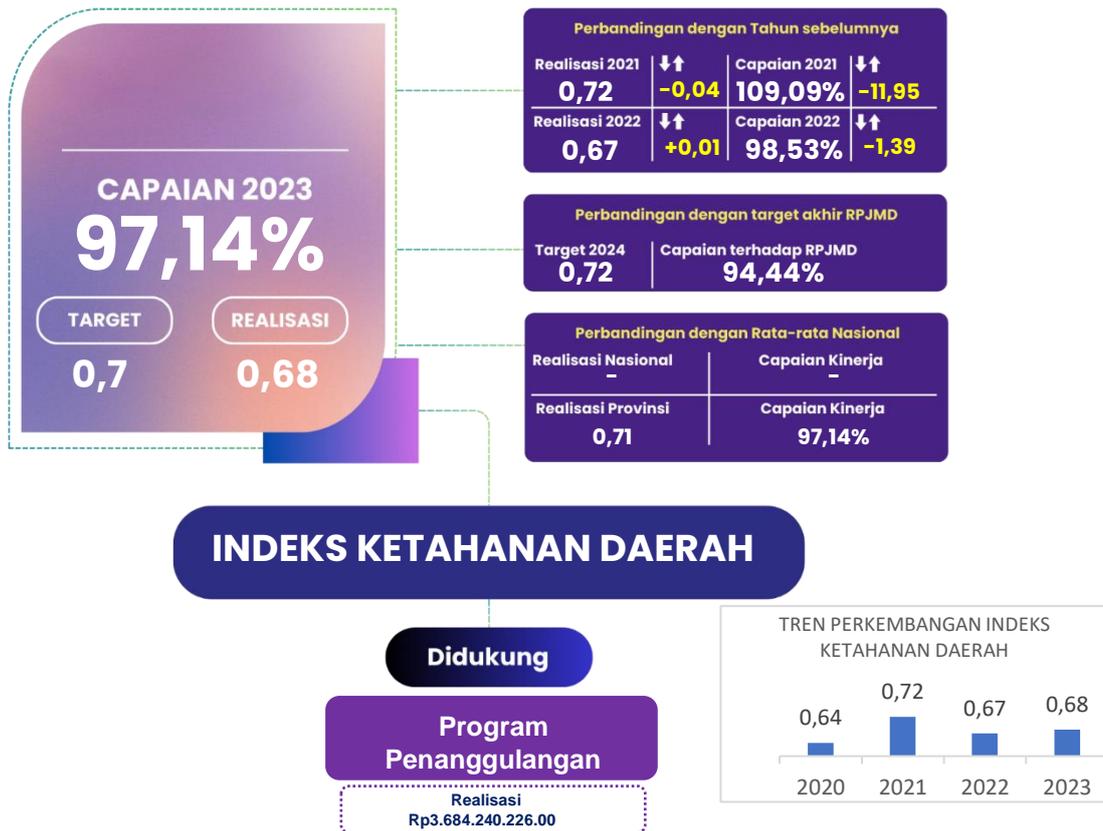
Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren fluktuatif. Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah sebesar **97,14%** dengan realisasi sebesar **0,68 poin** dari target sebesar **0,7 poin**.

SASARAN 12:

Meningkatnya Kapasitas Terhadap Bencana

Sasaran ini diukur oleh Indeks Ketahanan Daerah. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Sumber : Penilaian BNPB Provinsi Jawa Barat

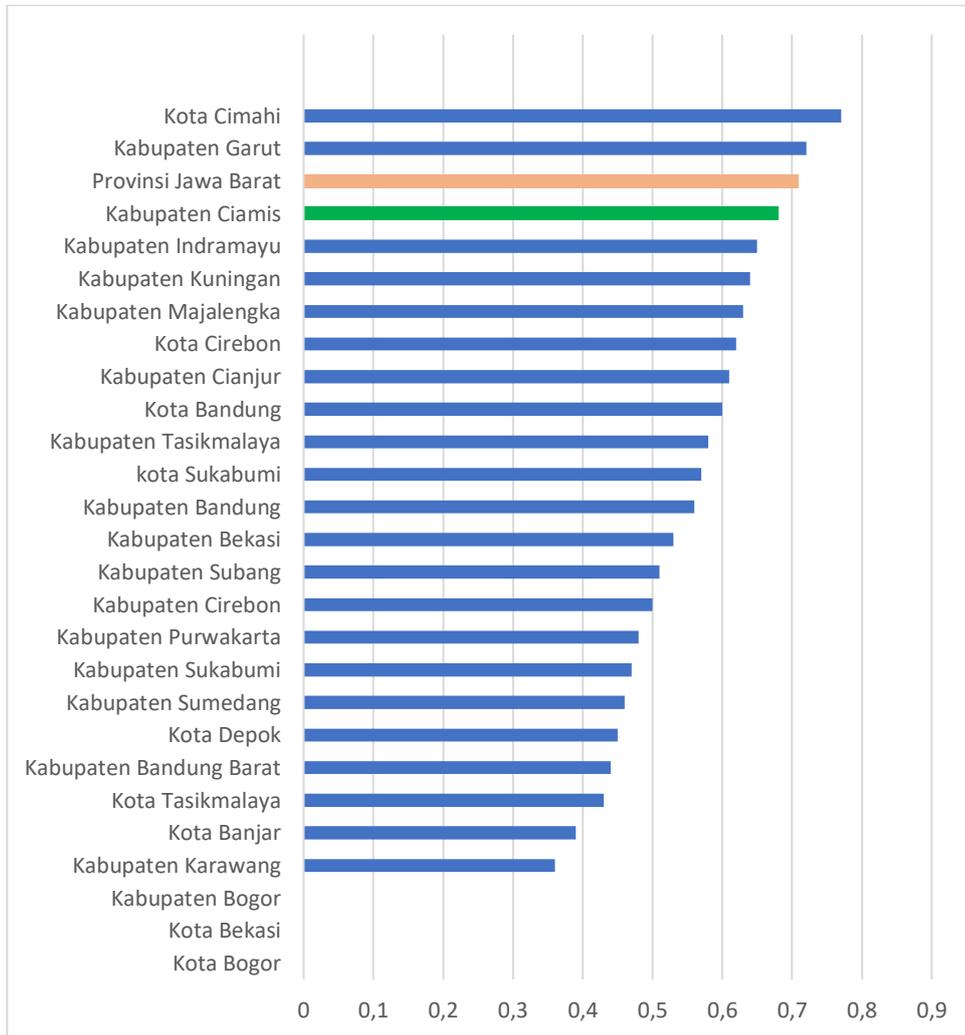
Jika dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **98,53%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **1,39%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **0,7 poin** dengan realisasi **0,68 poin** maka capaian Indeks Ketahanan Daerah sebesar **97,14%**, sedangkan apabila dibandingkan

dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **0,72 poin** maka capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2023 masih lebih rendah yaitu **94,44%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Indeks Ketahanan Daerah masih kurang **0,04 poin**.

Grafik 3. 5

Indeks Ketahanan Daerah se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : Penilaian Indeks Ketahan Daerah BNPB Provinsi Jawa Barat

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar **0,71 poin** Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Ciamis lebih rendah **0,02 poin**. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis menempati urutan ke empat.



Tidak tercapainya target Indeks Ketahanan Daerah dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya secara optimal Penyediaan dokumen kebencanaan
2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang mitigasi kebencanaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan FGD dengan OPD Terkait mengenai peningkatan kapasitas daerah
2. Menyusun 7 (tujuh) dokumen kebencanaan rencana kontijensi (Rekon)
3. Menyusun formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kebencanaan
4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang mitigasi

Program yang mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Daerah meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penanggulangan Bencana.

Sisa anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **14,33%** atau **Rp616.340.447,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp3.684.240.226,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp4.300.580.673,00** atau capaian **85,67%**.

SASARAN 13:

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas

Sasaran ini diukur oleh 3(tiga) indikator kinerja yaitu Hasil Evaluasi AKIP, Opini BPK dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

| Rata-rata Capaian Sasaran 13 | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 100% | 99,48% | 100,06% |

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan namun capaian kinerja mengalami penurunan. Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP sebesar **98,23%** dengan realisasi sebesar **69,30 poin** dengan kategori **B** dari target sebesar **70,55 poin** atau kategori **BB**



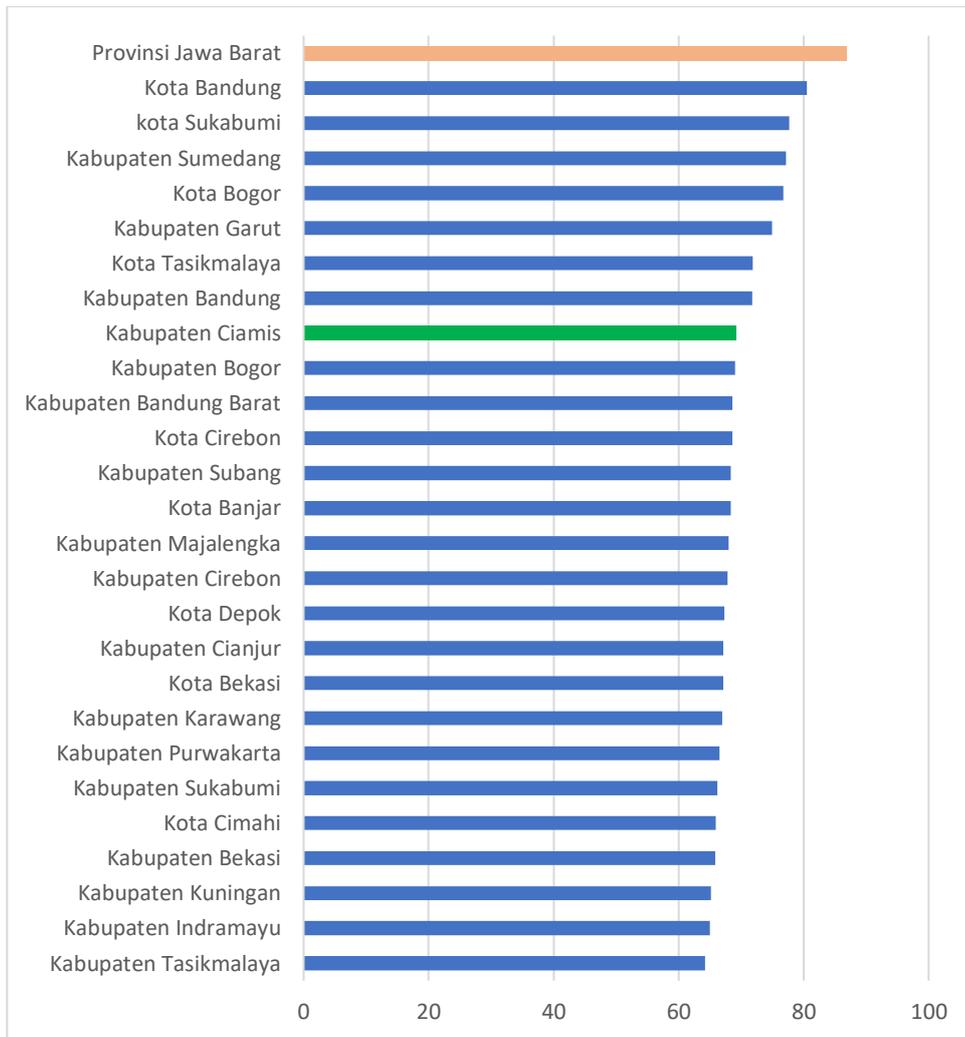
Sumber : LHE SAKIP KemenPAN RB Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **98,43%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **0,2%**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **70,55 poin** atau **kategori BB** dengan realisasi **69,30 poin** maka capaian Hasil Evaluasi AKIP sebesar **98,23%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **80,00 poin** atau **kategori A** maka capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 masih lebih rendah yaitu **86,63%** atau masih kurang **10,7 poin**.

Grafik 3. 6

Nilai SAKIP se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : LHE SAKIP KemenPAN RB Tahun 2023

Bila dengan capaian Hasil Evaluasi AKIP Provinsi Jawa Barat sebesar **87,00 poin** Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis lebih rendah **17,7 poin**.

Tidak tercapainya target Hasil Evaluasi AKIP dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan Pembangunan daerah
2. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif
3. Penyusunan LKIP PD belum sepenuhnya berpedoman pada PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014
4. Informasi hasil laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun selanjutnya.
5. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) belum diunggah dalam website Kabupaten dan PD.
6. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas pengelola SAKIP PD

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Sinkronisasi dan asistensi antar dokumen perencanaan Pembangunan daerah
2. Adanya desk/verifikasi dalam rangka mesinergikan program kegiatan, sub kegiatan dan indikatornya.
3. Melaksanakan asistensi pendampingan SAKIP
4. Menyusun dan mensosialisasikan Format Pelaporan SAKIP PD
5. Melaksanakan desk untuk penyesuaian target indikator dari sasaran strategis Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2024.
6. Melaksanakan monitoring atas pengunggahan LKIP (Pemda dan PD) dalam website Kabupaten dan PD.
7. Melaksanakan bimtek peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP PD

Program yang mendukung pencapaian Hasil Evaluasi AKIP meliputi 4 (empat) program, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sisa anggaran dari 4 (empat) program tersebut sebesar **0,83%** atau **Rp26.072.575,00**. Perhitungan ini didapat dari realisasi sebesar **Rp4.926.761.174,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp4.952.833.750,00** atau capaian **99,28%**.

2. Opini BPK

Opini BPK Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren yang stabil. Capaian Kinerja Opini BPK sebesar **100%** dengan realisasi sebesar **WTP** target sebesar **WTP**.

Jika dibandingkan dengan Opini BPK Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **100%** atau tetap dengan kategori **WTP**.

Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 yaitu **WTP** sudah terealisasi maka capaian Opini BPK sebesar **100%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **WTP** sudah dapat terealisasi.

Tercapainya target Opini BPK dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Tingginya Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi penyelenggaraan rekonsiliasi dengan pengelola keuangan OPD
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD Akuntansi, dan pelaporan
3. Melaksanakan pembinaan kepada Operator, Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah



Sumber : BPK RI



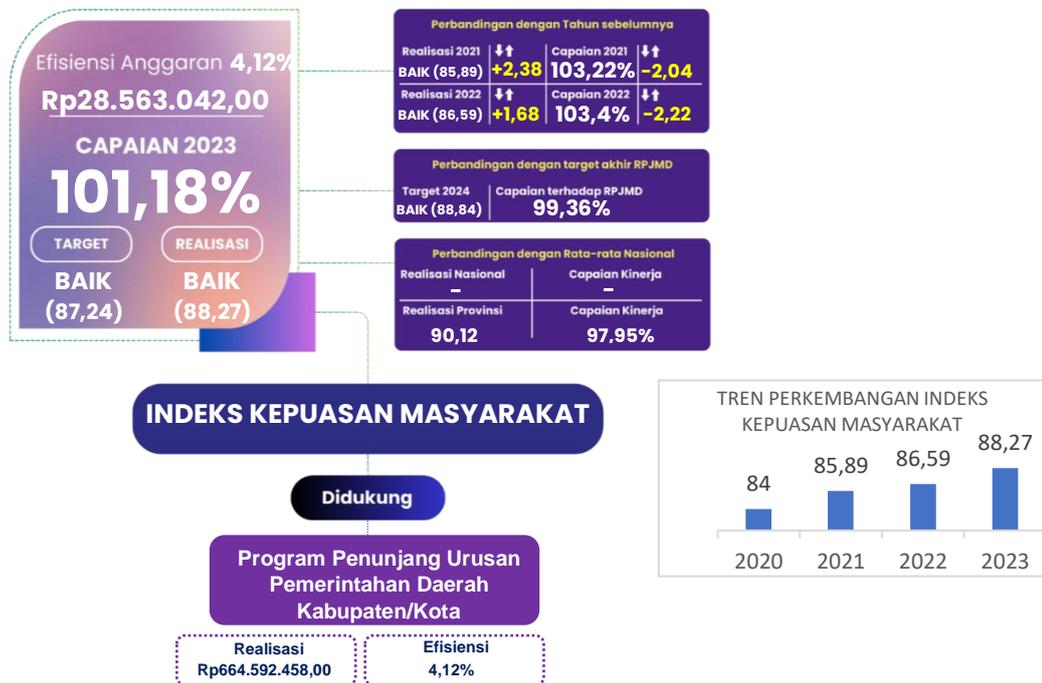
Pemerintah Kabupaten Ciamis meraih predikat WTP selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut. Hal ini merupakan wujud keseriusan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Program yang mendukung pencapaian Opini BPK meliputi 2 (dua) program, yaitu Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kinerja Pemerintah Daerah.

Efisiensi anggaran dari 2 (dua) program tersebut sebesar **19,16%** atau **Rp30.191.421.345,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp525.338.270.073,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp555.529.691.418,00**, atau capaian **80,84%**.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **101,18%** dengan realisasi sebesar **88,27 (B/Baik)** dari target sebesar **87,34 poin (B/Baik)**.



Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **103,4%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **2,22%**, namun realisasi kinerja meningkat.

IKM Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar **88,27 poin (B/Baik)** melebihi target IKM Tahun 2023 pada Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu sebesar **84,39 (B/Baik)**, sehingga capaian kinerja IKM Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mencapai **104.60%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 yaitu **88,84 poin (B/BAIK)** Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sudah mencapai **99,36%** atau untuk mencapai target akhir Perubahan RPJMD dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat masih kurang **0,29 poin**.

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebesar **90,12 poin**, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis masih dibawah **1,85 poin**.

Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya hambatan sebagai berikut

1. Pelaksanaan SKM secara elektronik melalui siskacampernik.ciamiskab.go.id mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengisian survei oleh responden dan pengelolaan hasil SKM oleh setiap Unit Pelayanan Publik (UPP)
2. Terbentunya Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Pembinaan mandiri dari OMBUDSMAN RI dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dari KEMENPANRB
5. Adanya berbagai inovasi layanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP)
6. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Pelayanan
7. Adanya komitmen aparaturnya pemerintah untuk menginternalisasi Budaya Kerja ASN "BerAKHLAK" dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa"
8. Optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan dan Pengelola Pengaduan
2. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi mandiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Meningkatkan sistem layanan menuju digitalisasi layanan publik
4. Meningkatkan inovasi layanan publik.
5. Pengembangan e-SKM Siska Campernik
6. Mengikuti ASN Culture Fest dari KEMENPANRB
7. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Ciamis (PEPATAH MANIS)



Adapun inovasi yang telah dilaksanakan dalam mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat:

PEPATAH MANIS (Pelayanan Terpadu Pemerintah Untuk Masyarakat Ciamis)

PEPATAH MANIS atau Pelayanan Terpadu Pemerintah untuk Masyarakat Ciamis merupakan terobosan dan inovasi mengenai metode pemberian pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang dilakukan secara terpadu, kolaboratif dan berkala yang melibatkan unit pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun instansi vertikal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, tidak diskriminatif serta adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi anggaran dari 1 (satu) program tersebut sebesar **4,12%** atau **Rp28.563.042,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp664.592.458,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp693.155.500,00**, atau capaian **95,88%**.

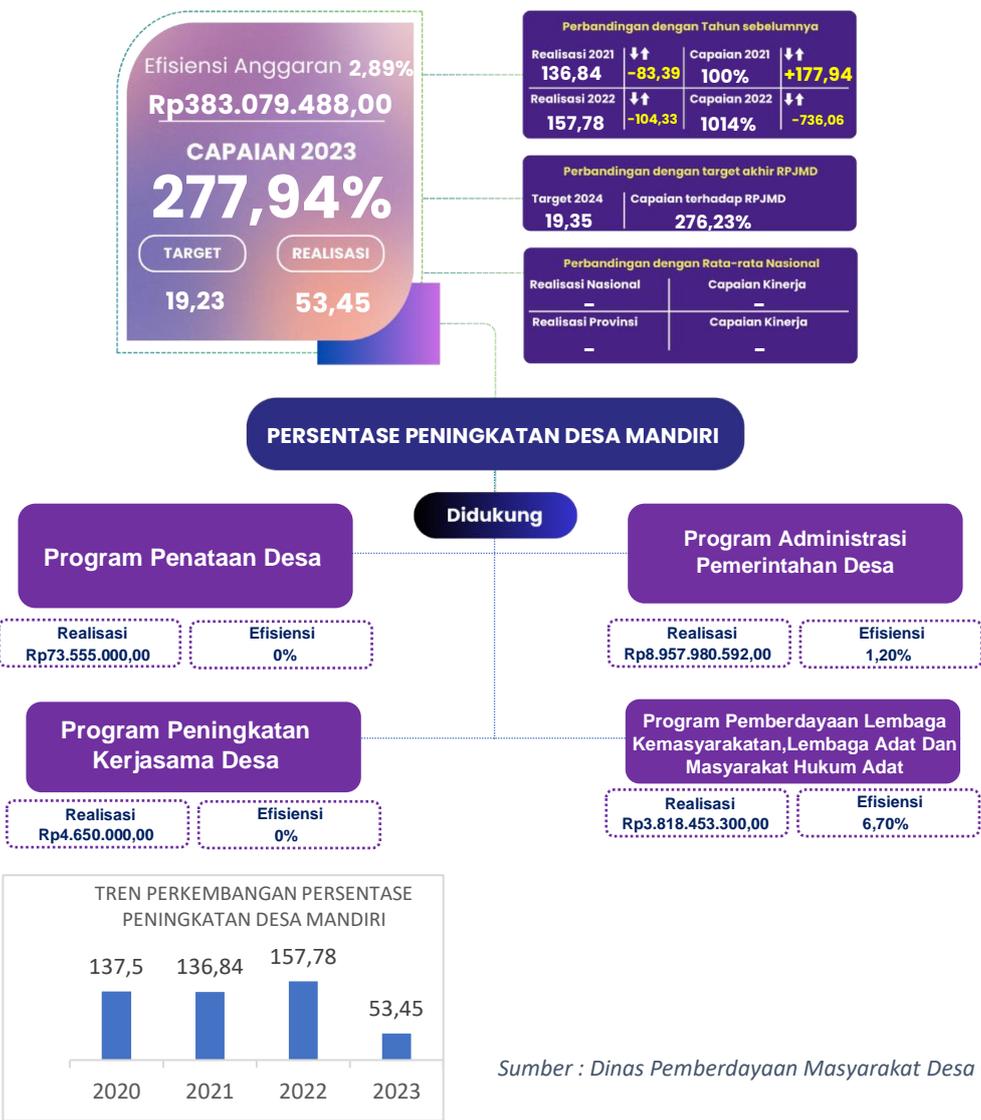
SASARAN 14:

Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran ini diukur oleh Persentase Peningkatan Desa Mandiri. Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Persentase Peningkatan Desa Mandiri

Persentase Peningkatan Desa Mandiri Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami tren peningkatan namun capaian kinerja mengalami penurunan. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Desa Mandiri sebesar **277,94%** dengan realisasi sebesar **53,45 poin** dari target sebesar **19,23 poin**.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Ciamis

Jika dibandingkan dengan Persentase Peningkatan Desa Mandiri Tahun 2022 capaian kinerja sebesar **1014%**, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar **736,06%**.

Dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar **19,23 poin** dengan realisasi **53,45 poin** maka capaian Persentase Peningkatan Desa Mandiri sebesar **277,94%**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2024 dengan target **19,35 poin** maka capaian kinerja sudah melebihi target **34,1 poin**.

Tercapainya Persentase Peningkatan Desa Mandiri dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, karena adanya faktor pendukung seperti tingginya kesadaran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri untuk Pembangunan desa

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan kemitraan dengan pendamping lokal desa dan pendamping desa.
2. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa.
3. Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan masyarakat desa.



Kabupaten Ciamis menoreh prestasi dalam rangka mendukung Persentase Desa Mandiri dengan diraihnya Peringkat Ke-3 Nasional Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Desa Mandiri tingkat Nasional dan Peringkat ke-1 Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Provinis Jawa Barat yang diraih oleh Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

Program yang mendukung pencapaian Persentase Peningkatan Desa Mandiri meliputi 4 (empat) program, yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

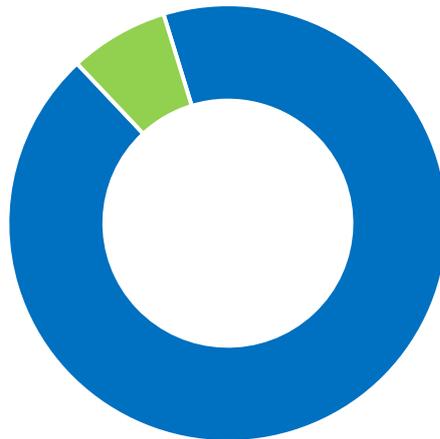
Efisiensi anggaran dari 4 (empat) program tersebut sebesar **2,89%** atau **Rp383.079.488,00**. Efisiensi ini didapat dari realisasi sebesar **Rp12.854.638.892,00** dengan pagu anggaran sebesar **Rp13.237.718.380,00**, atau capaian **97,11%**.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

| No | SASARAN STRATEGIS | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Selisih Anggaran (Rp) | Capaian (%) | Efesiensi (%) |
|----|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan | 264.049.748.226,00 | 234.664.275.013,00 | 29.385.473.213,00 | 88,87 | 11,13 |
| 2 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan | 165.900.895.062,00 | 134.507.604.615,00 | 31.393.290.447,00 | 87,60 | 12,41 |
| 3 | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | 5.024.359.000,00 | 2.563.918.690,00 | 52.387.722,00 | 99,23 | 7,34 |
| 4 | Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan | 20.703.561.050,00 | 19.414.678.419,00 | 1.288.882.631,00 | 91,33 | 8,65 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata | 465.530.874.155,00 | 438.642.467.116,00 | 26.888.407.039,00 | 94,22 | 9,93 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata | 9.871.341.900,00 | 9.078.442.637,00 | 792.899.263,00 | 95,74 | 4,26 |
| 7 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah | 52.176.873.400,00 | 50.030.235.518,00 | 2.146.637.882,00 | 95,89 | 4,11 |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi | 2.110.109.300,00 | 1.870.591.050,00 | 239.518.250,00 | 89,69 | 10,31 |
| 9 | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 9.620.561.000,00 | 9.313.426.000,00 | 307.135.000,00 | 89,08 | 10,82 |
| 10 | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | 2.595.382.732,00 | 2.557.507.250,00 | 37.875.482,00 | 95,96 | 4,04 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|
| 11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 18.361.407.650,00 | 17.151.559.860,00 | 1.209.847.790,00 | 95,32 | 5,37 |
| 12 | Meningkatnya Kapasitas Terhadap Bencana | 4.300.580.673,00 | 3.684.240.226,00 | 616.340.447,00 | 85,67 | 14,33 |
| 13 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | 561.175.680.668,00 | 530.929.623.705,00 | 30.246.056.962,00 | 91,97 | 8,04 |
| 14 | Meningkatnya Kemandirian Desa | 13.237.718.380,00 | 12.854.638.892,00 | 383.079.488,00 | 97,11 | 2,89 |

REALISASI ANGGARAN



REALISASI



EFISIENSI

Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar **Rp1.594.659.093.196,00**. Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar **Rp1.463.578.968.765,00** atau sebesar **91,78 %**. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 13(tiga belas), yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien sebesar 91,97%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 8(delapan), yaitu Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi 89,69%.

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 14 sasaran, terdapat 9 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,69% atau senilai Rp120.044.234.535,00 yang rinciannya sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan” tercapai melalui Kinerja “Indeks Kesehatan” sebesar 105,03% dan efisiensi anggaran sebesar 12,41%.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” tercapai melalui Kinerja “Indeks Pengeluaran per kapita” sebesar 100,26% dan efisiensi anggaran sebesar 7,34%.
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata” tercapai melalui Kinerja “Indeks Pembangunan Infrastruktur” sebesar 102,29% dan Indeks Keselamatan Lalu Lintas sebesar 102,136 % dan efisiensi anggaran sebesar 9,93%.
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata” tercapai melalui Kinerja “Persentase Rumah Layak Huni” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 4,26%.
5. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi” tercapai melalui Kinerja “Persentase Peningkatan Investasi” sebesar 242,91% dan efisiensi anggaran sebesar 10,31%.
6. Sasaran Strategis “Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja” tercapai melalui Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 4,04%.
7. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” tercapai melalui Kinerja Indeks “Kualitas Air sebesar 100,99%, Indeks Kualitas Udara sebesar 106,84% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 171,77%” dan efisiensi anggaran sebesar 5,37%.
8. Sasaran Strategis “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” tercapai melalui Kinerja Opini BPK sebesar 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,18% dan efisiensi anggaran sebesar 8,04%.
9. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kemandirian Desa” tercapai melalui Kinerja “Persentase Peningkatan Desa Mandiri” sebesar 277,94% dan efisiensi anggaran sebesar 2,89%

BAB IV

PENUTUP





PENUTUP

LKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Perubahan RPJMD dan Perjanjian Kinerja Bupati Ciamis Tahun 2023.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena dapat terealisasi 13 dari 22 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 10 target;
2. Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 3 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 9 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp1.463.578.968.765,00 dengan efisiensi sebesar 9,69% atau senilai Rp120.044.234.535,00

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan perangkat daerah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

An aerial, black and white photograph of a large, empty stadium. The stadium is oval-shaped with tiered seating around a central soccer field. Two goalposts are visible on the field. The stadium is surrounded by residential buildings and trees. The word "LAMPIRAN" is overlaid in large, white, bold letters across the center of the image.

LAMPIRAN